

**LAPORAN**  
**STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2009**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



# **BUPATI TANAH BUMBU**

Alamat Kantor : Jl. Darma Praja No. 01 Gunung Tinggi Batulicin Kalimantan Selatan

---

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikanNya sehingga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 dapat diselesaikan dengan baik.

Guna mengantisipasi sejauh mana dampak pembangunan berpengaruh terhadap komponen lingkungan hidup maka dihimpun berupa data dan informasi lingkungan hidup yang memberikan gambaran seobyektif mungkin baik terhadap dampak kegiatan manusia (Sosial Ekonomi) maupun pengaruh peristiwa alam terhadap komponen kependudukan dan lingkungan hidup dalam jangka satu tahun.

Kami menyadari bahwa Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tanah Bumbu ini belum sepenuhnya lengkap dan maksimal, serta masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan Laporan yang akan datang

Diharapkan dengan adanya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas gagasan, wawasan dan pemahaman dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.

Batulicin, Desember 2009

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ZAIRULLAH AZHAR**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>PETA</b>	
<b>Bab I</b>	
<b>1.1 VISI DAN MISI KABUPATEN TANAH BUMBU</b>	
1.1.1. Visi Kabupaten Tanah Bumbu	I-1
1.1.2. Misi Kabupaten Tanah	I-1
<b>KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA</b>	
<b>A. LAHAN DAN HUTAN</b>	
A.1. Kondisi Kualitas Lahan/Tanah, Tutupan Lahan, Luas Kawasan Lindung, Dan Luas Lahan Kritis	I-3
<b>B. KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>	
B.1. Kondisi Keanekaragaman Hayati	I-6
<b>C. AIR</b>	
C.1. Kondisi Kualitas Sumber-Sumber Air	I-7
C.2. Kondisi Kuantitas Sumber-Sumber Air	I-7
<b>D. UDARA</b>	
D.1. Kondisi Kualitas Udara	I-14
<b>E. LAUT, PESISIR DAN PANTAI</b>	
E.1. Kondisi Umum Pesisir dan Laut	I-18
<b>F. IKLIM</b>	
F.1. Kondisi Iklim	I-21
<b>G. BENCANA ALAM</b>	
G.1. Kondisi Geografis Kabupaten Tanah Bumbu dan Keterkaitannya Dengan Terjadinya Bencana Alam, Korban serta Taksiran Kerugiannya	I-22
<b>Bab II</b>	
<b>TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN</b>	
<b>A. KEPENDUDUKAN</b>	
A.1. Informasi Jumlah, Pertumbuhan, Dan Kepadatan Penduduk, Serta Pola Migrasi	II-1
A.2. Informasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur Dan Status Pendidikan	II-2
<b>B. PERMUKIMAN</b>	
B.1. Informasi jumlah rumah tangga Miskin di Kabupaten Tanah Bumbu	II-3
B.2. Informasi Jumlah Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Sampah, Dan Tempat Buang Air Besar	II-4
<b>C. KESEHATAN</b>	
C.1. Informasi usia harapan hidup, angka kelahiran, angka kematian, dan pola penyakit yang banyak diderita	II-5

	<b>Halaman</b>
<b>D. PERTANIAN</b>	
D.1. Informasi Perubahan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian	II-7
D.2. Informasi Penggunaan Pupuk Untuk Lahan Sawah, Lahan Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan	II-8
<b>E. INDUSTRI</b>	
E.1. Informasi Jumlah Industri Yang Berpotensi Menceinari Sumber Air Dan Udara, Tingkat Ketaatan Terhadap Baku Mutu	II-10
<b>F. PERTAMBANGAN</b>	
F.1. Informasi Produksi Dan Luas Areal Konsesi Pertambangan Yang Perizinan Dan Atau Pengawasannya Merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota	II-12
<b>G. TRANSPORTASI</b>	
G.1. Informasi Sarana dan Prasarana Transportasi Kabupaten Tanah bumbu	II-16
<b>H. PARIWISATA</b>	
H.1. Informasi Lokasi-Lokasi Wisata Dan Jumlah Pengunjung Serta Jumlah Hotel/Penginapan	II-17
<b>I. LIMBAH B3</b>	
I.1. Informasi perusahaan penghasil limbah B3 serta perusahaan yang mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan, mengangkut, dan memusnahkan limbah B3	II-20
 <b>Bab III</b>	
<b>UPAYA PENGLOLAAN LINGKUNGAN</b>	
<b>A. REHABILITASI LINGKUNGAN</b>	III-1
A.1. Rencana Dan Realisasi Kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Dan Kegiatan Fisik Lainnya Yang Terkait Dengan Perbaikan Kondisi Lingkungan	III-1
<b>B. AMDAL</b>	
B.1. Rekomendasi AMDAL Yang Diberikan Dan Hasil Pengawasan Pelaksanaan UKL/UPL	III-3
<b>C. PENEGAKAN HUKUM</b>	
C.1. Pengaduan Masyarakat Dan Tindak Lanjutnya	III-8
<b>D. PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	
D.1. Upaya Perbaikan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat	III-9
<b>E. KELEMBAGAAN</b>	
E.1. Produk Hukum Yang Dihasilkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	III-12

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

	Judul / Uraian Tabel	Halaman
Tabel A.1.1	Luas Hutan Menurut Fungsi / Statusnya	I-4
Tabel A.1.2	Luas Penutupan Lahan	I-4
Tabel C.1.2.1.1	Data Sampel air pada daerah aliran sungai Kusan	I-8
Tabel C.1.2.1.2	Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Kusan	I-8
Tabel C.1.2.2.1	Data Sampel air pada daerah aliran sungai Satui	I-9
Tabel C.1.2.2.2	Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Satui	I-9
Tabel C.1.2.3.1	Data Sampel air pada daerah aliran sungai Batulicin	I-9
Tabel C.1.2.3.2	Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Batulicin	I-10
Tabel C.1.2.4.1	Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Kusan	I-10
Tabel C.1.2.5.1	Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Satui	I-11
Tabel C.1.2.6.1	Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Batulicin	I-12
Tabel D.1.1	Perbandingan hasil pengukuran dan analisa kualitas udara di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 dan 2009	I-15
Tabel D.1.2	Perbandingan hasil pengukuran tingkat kebisingan pada kawasan Industri dan pemukiman di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 dan 2009	I-16
Tabel E.1.1	Potensi Ekosistem Mangrove	I-18
Tabel E.1.2	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang	I-18
Tabel F.1.1	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Kabupaten Tanah Bumbu	I-21
Tabel F.1.2	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten Tanah Bumbu	I-21
Tabel G.1.1	Banyaknya Kejadian Bencana Alam, Korban dan Taksiran Kerugiannya Tahun 2007/2008	I-23
Tabel G.1.2.	Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Tahun 2008	I-23
Tabel A.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk	II-1
Tabel A.2	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir	II-2
Tabel B.1	Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan	II-3
Tabel B.2	Jumlah Rumah Tangga dan menurut Cara Pembuangan Sampah	II-4
Tabel B.3	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	II-5
Tabel C.1	Jumlah Akta yang Dikeluarkan Menurut Jenis Akta	II-6

Tabel C.2	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk	II-7
Tabel D.1	Luas Perubahan Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian	II-8
Tabel D.2	Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Perkebunan menurut Jenis Pupuk	II-9
Tabel D.3	Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Pupuk	II-9
Tabel E.1	Jumlah Industri/Kegiatan Usaha Skala Menengah dan Besar	II-10
Tabel E.2	Jumlah Industri/Kegiatan Usaha Skala Kecil	II-11
Tabel F.1	Produksi Pertambangan menurut Jenis Bahan Galian	II-12
Tabel F.2	Pengawasan UKL/UPL	II-14
Tabel I.1	Sarana Hotel/Penginapan, Jumlah Kamar, dan Tingkat Hunian	II-19
Tabel J.1	Perusahaan Penghasil Limbah B3 dan Jenis Limbah	II-20
Tabel J.2	Perusahaan yang Mendapat Izin untuk Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pemusnahan ( <i>Land Fill</i> ) Limbah B3 dan Perusahaan Perusahaan yang Mendapat Rekomendasi dan Izin dari Perhubungan untuk Pengangkutan Limbah B3	II-22
Tabel A.2.1	Rencana Dan Realisasi Kegiatan Penghijauan (Hutan Rakyat)	III-2
Tabel A.2.2	Realisasi Kegiatan Reboisasi	III-2
Tabel B.1	Rekomendasi AMDAL/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah	III-4
Tabel B.2	Pengawasan UKL-UPL	III-6
Tabel C.1	Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah dan Status Pengaduannya	III-8
Tabel D.1	Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat	III-10
Tabel E.1	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan	III-12
Tabel E.2	Anggaran Pengelolaan Lingkungan	III-14
Tabel E.3	Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan	III-14

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Judul/Uraian Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Kondisi Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu	I-5
Gambar 2	Kondisi Hutan Setelah Adanya Kegiatan Penebangan Liar	I-5
Gambar 3	Kondisi Sumber Daya Air DAS Satui dan Kusan	I-13
Gambar 4	Pengambilan Sampel Air	I-14
Gambar 5	Analisa Parameter Insitu Sampel Air	I-14
Gambar 6	Upaya Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Satui Baratama Untuk Menanggulangi Peningkatan Kadar Debu Di Sekitar Jalan Angkut	I-17
Gambar 7	Kondisi Ekosistem Mangrove	I-20
Gambar 8	Kondisi Kerusakan Ekosistem Mangrove	I-20
Gambar 9	Kondisi Perubahan Lingkungan Pada Areal Pertambangan PT. Autum Bara Energi	II-16
Gambar 10	Kondisi Obyek Wisata Alam Pantai di Kabupaten Tanah Bumbu	II-18
Gambar 11	Limbah B3 Pada Areal Pelabuhan Khusus dan Pertambangan	II-23
Gambar 12	Kondisi Hasil Rehabilitasi Mangrove Oleh Kelompok Pelestari Mangrove	III-11
Gambar 13	Kegiatan Penanaman Mangrove Oleh Kelompok Pelestari Mangrove	III-11

# **BAB I**

## **KONDISI LINGKUNGAN HIDUP**

### **1.1. VISI DAN MISI KABUPATEN TANAH BUMBU**

#### **1.1.1. Visi Kabupaten Tanah Bumbu**

Terwujudnya Tanah Bumbu sebagai Kabupaten Multipotensi dan Multiprospek, Bersatu, Maju, Mandiri, Agamis, Menuju Masyarakat Madani.

#### **1.1.2. Misi Kabupaten Tanah Bumbu**

- a. Terbentuknya pusat pemerintahan baru guna mempermudah koordinasi dan memperlancar pelayanan masyarakat
- b. Penataan dan pemberdayaan institusi yang ada baik di lingkungan pemerintah maupun lembaga – lembaga yang ada di lingkungan masyarakat
- c. Penegakan supremasi hukum, menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat
- d. Peningkatan kualitas SDM dan kesehatan
- e. Terciptanya pemerintah yang baik dengan meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha
- f. Penggalakan partisipasi masyarakat di segala bidang kehidupan, baik dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam pemerintahan dan pembangunan
- g. Peningkatan kemampuan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan yang mampu mendorong dan menumbuhkembangkan investasi di bidang jasa, perdagangan dan industri yang ramah lingkungan dengan dilandasi oleh semangat ekonomi kerakyatan
- h. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representative dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sehat sejahtera dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- i. Peningkatan kemampuan Pemerintahan Kabupaten sebagai daerah otonom dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan prospek Kabupaten Tanah Bumbu di masa mendatang.

Kabupaten Tanah Bumbu diusia yang masih muda ini, dihadapkan pada beberapa permasalahan lingkungan seperti penurunan kualitas lingkungan sebagai warisan masa lalu. Hal ini berimbas pada penataan lingkungan yang kompleks, biaya yang tinggi dan memakan waktu pemulihan yang lama.

Pengintegrasian pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, secara eksplisit tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup melalui penekanan pada pengelolaan lingkungan alam, pengelolaan lingkungan buatan dan pengelolaan lingkungan sosial.

Dilihami oleh manajemen Allahiah bahwa tiga aspek penekanan ini dilakukan secara seimbang, tidak hanya menekankan pengendalian pencemaran tapi juga pengendalian upaya pengelolaan untuk melestarikan nikmat-Nya. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan bagi peningkatan mutu hidup masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Kebersamaan dan kesepahaman para pihak dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan prinsip sinergis, sinkronisasi dan terpadu, sangat diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Penanggulangan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi : penurunan kualitas lingkungan dan faktor manajemen pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang belum memadai, dilakukan melalui strategi penanggulangan yang diarahkan pada pengendalian laju pengrusakan dan pencemaran, pembalikan arah kecendrungan menuju perbaikan kualitas lingkungan, pengembangan kualitas lingkungan yang sudah pulih, sosialisasi, peningkatan kapastias kelembagaan dan pendidikan serta penataan hukum lingkungan (*Low Inforcement*).

Pada tahun 2009, tercatat beberapa isu lingkungan hidup utama di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

- a. Kerusakan lingkungan fisik, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam (kegiatan ladang berpindah, perambahan hutan, pertambangan) yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih makro, dimana banyak hutan dan lahan mengalami kekeringan dan dalam kondisi kritis karena vegetasi pembentuk kawasan tersebut ditebang yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, erosi dan sedimentasi.
- b. Penurunan kualitas dan kuantitas air, sebagai akibat dari meningkatnya pengerukan pasir sungai, sarana pelabuhan khusus dan kegiatannya, hilangnya/ pendangkalan alur alami sungai, penyempitan daerah tangkapan air, pengelolaan lingkungan yang tidak terencana dengan baik yang dilakukan oleh tambang batubara, besi, emas dan tambang lainnya, yang merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Semua faktor tersebut terakumulasi menjadi dampak penurunan lingkungan yang paling utama yaitu terjadinya banjir di beberapa daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

- c. Penurunan kualitas udara, karena meningkatnya kadar bahan pencemar udara akibat transportasi dan kegiatan prosesi tambang, industri CPO dan sebagian pelaku usaha atau masyarakat yang membakar lahannya untuk kepentingan sendiri karena beranggapan dengan membakar lahan tersebut memerlukan biaya yang murah, cepat dan efektif sehingga akumulasi dan kegiatan tersebut mengakibatkan kabut asap yang sangat merugikan, baik segi kesehatan maupun lingkungan.
- d. Kerusakan Pesisir, Laut dan Hutan Mangrove, akibat tidak disiplinnya jalur pelayaran tongkang batubara, abrasi, pertambangan, pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana, dan pengambilan kayu.
- e. Penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan karena hilangnya hutan kota dan jalur hijau oleh pemukiman dan pembangunan serta penanganan sampah yang belum maksimal.

Secara umum dapat digambarkan kondisi lingkungan Kabupaten Bumbu dari berbagai aspek lingkungan adalah sebagai berikut :

## **A. LAHAN DAN HUTAN**

### **A.1. Kondisi Kualitas Lahan/Tanah, Tutupan Lahan, Luas Kawasan Lindung, Dan Luas Lahan Kritis**

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar, besarnya potensi sumber daya hutan yang tercermin dari luas kawasan hutannya menempatkan sektor kehutanan sebagai sektor andalan yang sangat strategis dan potensial dalam mendukung pembangunan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dalam meningkatkan devisa atau pendapatan asli daerah, maka baik pemerintah maupun pemerintah daerah melakukan kebijakan pembangunan di berbagai sektor, yaitu di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan budidaya yang dalam proses pelaksanaannya kegiatannya rawan terjadinya perubahan ekologi, kebakaran hutan dan lahan.

Setiap tahunnya terjadi kerusakan hutan dan lahan dengan tingkat kerusakan yang sangat mengkhawatirkan serta degradasi hutan/lahan terus mengalami peningkatan yang signifikan dan perubahan status hutan/lahan akan terus menerus mengalami peningkatan sebagai sebagaimana kondisi luas kawasan hutan menurut fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Selatan yang pada tahun 2007 – 2008 total luas hutan 324.857,93 Ha, sedangkan pada tahun 2008 - 2009 luasnya mencapai 506.696,00 Ha. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel A.1.1. Luas Hutan Menurut Fungsi / Statusnya

No.	Hutan	Luas (Ha)	
		Tahun 2008	Tahun 2009
A	Kawasan Konservasi		
1	Cagar Alam	7.109,64	7.109,64
2	Suaka Margasatwa	-	-
3	Taman Wisata	-	-
4	Taman Buru	-	-
5	Taman Nasional	-	-
6	Taman Hutan Raya	-	-
B	Hutan Lindung	68.340,58	68.340,58
1	Hutan Produksi	180.155,25	180.155,25
2	Hutan Produksi Terbatas	31.847,47	31.847,47
3	Hutan Produksi Konservasi	36.134,99	36.134,99
C	Hutan Kota	-	183.002,07
<b>Total Luas Hutan</b>		<b>324.857,93</b>	<b>506.696,00</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu Tahun 2009  
Berdasarkan Kep.Menhutbun No. 453/Kpts-11/1999

Faktor pembanding lainnya yang menunjukkan laju kerusakan hutan semakin tahun semakin meningkat adalah dilihat dari data luas penutupan lahan tahun 2007 – 2008 total luasnya 500.763,06, sedangkan pada tahun 2008 – 2009 total luasannya menurun menjadi 91.936,062 ha, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel A.1.2. Luas Penutupan Lahan

No.	Kabupaten	Penutupan Lahan	
		Tahun 2008	Tahun 2009
1	Tanah Bumbu	500.763,06	91.936,062
<b>Total</b>		<b>500.763,06</b>	<b>91.936,062</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu  
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan

Hal ini mengindikasikan bahwa kerusakan lahan dan hutan dan tahun ke tahun bukannya menurun, tetapi sebaliknya. Beberapa faktor penyebab lajunya kerusakan lahan dan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, diantaranya yaitu konversi hutan (pengubahan fungsi kawasan hutan) atau pelepasan kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan atau tukar-menukar kawasan menjadi perkebunan, pertanian, pertambangan dan pemukiman serta transmigrasi, penebangan ilegal (*illegal logging*) dan kebakaran hutan dan lahan yang masih banyak terjadi tiap tahunnya di areal perusahaan HPH/HTI dan perkebunan dibandingkan areal milik masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan dan lahan tersebut terdiri dari 2 (dua) dampak yaitu: dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung meliputi penurunan struktur tanah dan ekosistem, perusakan sumberdaya alam dan keanekaragaman

hayati (*plasma nutfah*), penyempitan daerah tangkapan air (DTA), pendangkalan air sungai, erosi dan sedimentasi, meningkatnya breeding place, penambahan luas lahan kritis dan terjadinya banjir, sedangkan dampak tidak langsung meliputi terjadinya tingkat erosi permukaan yang lebih tinggi yang berakibat tanah kehilangan sifat plastisnya, penurunan porositas dan irifiltrasi tanah, berkurangnya daya tangkap tanah terhadap air, terjadinya perubahan pH tanah secara drastis, keseimbangan unsur hara terganggu. Semua ini akan terasa setelah beberapa tahun kemudian dan akan lebih mengalami kerusakan secara global.

Melihat kondisi kerusakan hutan dan lahan yang semakin meningkat, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya-upaya perbaikan melalui upaya rehabilitasi lahan dan hutan yang rusak, melakukan reboisasi pada LOA (*land over area*) atau areal kosong dan terlantar, mengatur perijinan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, sosialisasi mengurangi kebakaran lahan dan hutan baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan, melakukan pengawasan secara intensif aktivitas pembukaan lahan dengan mengeluarkan aturan mengenai pembakaran lahan dan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi hutan dan lahan, upaya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengendalian kebakaran hutan serta melakukan upaya pemadaman kebakaran pada lahan dan hutan yang terbakar.



Gambar 1. Kondisi Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 2. Kondisi Hutan Setelah Adanya Kegiatan Penebangan Liar

## B. KEANEKARAGAMAN HAYATI

### B.1. Kondisi Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan data keanekaragaman hayati dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dan Seksi III Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa pada tahun 2008 – 2009 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdapat  $\pm$  24 (dua puluh empat) jenis tumbuhan dan hewan langka/yang dilindungi. Angka ini jelas mengalami penurunan jumlah spesies dari tiap hewan yang dilindungi/langka dibandingkan data tahun sebelumnya (tahun 2007 – 2008) yaitu  $\pm$  54 (lima puluh empat) jenis tumbuhan langka/yang dilindungi dan 26 (dua puluh enam) jenis satwa langka/yang dilindungi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum adanya aktifitas eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan pembangunan, masih tersedia habitat bagi flora dan fauna sebagai tempat hidup dan berkembang biak. Tetapi setelah adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, menyebabkan keberadaan flora dan fauna kehilangan habitatnya, sehingga banyak flora dan fauna langka yang musnah.

Beberapa faktor penyebab penurunan kelestarian keanekaragaman hayati dari tahun ke tahun berasal dari kegiatan pertambangan pembukaan lahan untuk keperluan areal tambang batubara, perkebunan, areal penimbunan tanah pucuk, pembangunan sarana dan prasarana penambangan, serta aktifitas operasional peralatan yang tidak terkendali dikawasan hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati, meningkatnya penebangan liar (*illegal logging*), erosi, kebakaran, pestisida dan pupuk anorganik, pencemaran/polusi baik tanah, perairan maupun udara dan eksploitasi terhadap jenis tertentu dari perburuan satwa (langka/yang dilindungi) baik untuk keperluan konsumsi maupun komersial. Aktifitas pada sektor kehutanan oleh masyarakat juga berdampak pada kerusakan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (*plasma nutfah*). Tipe hutan yang tersusun secara berurutan menyebabkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersendiri. Tetapi pada kenyataannya hutan sebagai habitat dari sumber daya hayati, sekarang telah mengalami gangguan berat dari berbagai arah sehingga terus mengalami kerusakan. Konversi kawasan hutan untuk perkebunan sawit, pertambangan mineral/galian C, perburuan liar, dsb turut mempersempit habitat, ruang gerak dan berkembangbiaknya flora dan fauna serta perubahan ekosistem alam menuju pemusnahan keanekaragaman plasma nutfah yang mengakibatkan berkurangnya *biodiversity* baik flora maupun fauna yang ada di hutan tersebut sehingga terjadinya perubahan dan pengurangan varietas, kepunahan spesies dan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem.

Salah satu dampak yang diakibatkan dari berkurangnya jenis flora dan fauna adalah terganggunya keseimbangan ekosistem bagi kehidupan, terutama dalam penyediaan kebutuhan keanekaragaman hayati dan penyediaan jasa lainnya yang merupakan salah satu penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

## **C. AIR**

### **C.1. Kondisi Sumber Daya Air**

Secara umum pola sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah berpola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan secara merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan sedemikian tinggi hingga berpotensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir sungai dari DAS Tanah Bumbu (DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin). Panjang DAS Satui  $\pm$  26 Km dan Lebar 25 m, DAS Kusan  $\pm$  81 Km dan Lebar 30 m, dan panjang DAS Batulicin  $\pm$  50 Km dan Lebar 26 m. Daerah Aliran Sungai tersebut memiliki banyak anak sungai yang digunakan sebagai sumber air dan transportasi sungai. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus, air minum serta irigasi persawahan.

Kecenderungan konsumsi air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu secara ekspansial akan terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan ketersediaan air bersih cenderung mengalami penurunan sebagai akibat adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, sehingga berakibat pada kerusakan alam dan pencemaran. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi Kabupaten Tanah Bumbu menjadi hal yang sangat mendesak sesuai dengan tingkat kepadatan dan kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan disisi lain banyak perusahaan baik perkebunan, pertambangan maupun industri lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung limbah industri yang dihasilkan akan masuk / mengalir ke sungai dimana banyak penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang hidup disepanjang Daerah Aliran Sungai tersebut.

#### **C.1.1. Kondisi Kuantitas Air**

Potensi air di Kabupaten Tanah Bumbu cukup besar, salah satu diantaranya adalah potensi sumber daya air permukaan. Kondisi sumber daya air permukaan mulai menunjukkan gejala penurunan terhadap kuantitas air.

Kondisi ini dinilai dari besarnya fluktuasi debit air minimum dan maksimum pada DAS Tanah Bumbu yang selalu terjadi pada setiap musim kemarau, dimana air sungai mengalami kekeringan yang cukup signifikan artinya air surut lebih tinggi yang menyebabkan menurunnya debit air. Tetapi apabila terjadi curah hujan yang cukup banyak, maka DAS Satui, Kusan dan DAS Batulicin mengalami kenaikan debit air yang cukup tinggi tetapi keadaan airnya lebih keruh akibat tanah pada bagian hulu sungai ikut terkikis.

#### **C.1.2. Kondisi Kualitas Air**

Selain kuantitasnya, kualitas air sungai yang ada di DAS Tanah Bumbu serta anak sungai juga mulai terjadi penurunan secara kualitas bila dibandingkan dengan sebelum adanya aktivitas-aktivitas yang menimbulkan dampak pencemaran. Seperti pada tahun-tahun

sebelumnya, tahun 2009 juga telah dilakukan pemantauan kualitas air pada DAS Tanah Bumbu (DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin) dengan mengambil 9 (sembilan) titik sampel secara random, dimana masing DAS diambil 3 (tiga) titik sampel. Sampel air tersebut telah dianalisa oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang bekerja sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Banjarmasin pada pemantauan DAS periode I dan bekerjasama dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri Provinsi Kalimantan Selatan pada pemantauan DAS periode II, didapatkan hasil analisa sebagai berikut :

### C.1.2.1. Analisa Kualitas Air pada DAS Kusan Tahun 2009

Tabel C.1.2.1.1. Data Sampel air pada daerah aliran sungai Kusan

Kegiatan	Titik Pengambilan Sampel		
	Titik I	Titik II	Titik III
Lokasi Pengambilan Sampel	Dermaga Kepayang Desa Tapus Kec. Kusan Hulu	Jembatan Binawara Desa Binawara Kec. Kusan Hulu	Jemb. Pagatan Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir
Titik Koordinat Pengambilan Sampel	0355109 - 9621053	0364268 - 9614682	0381215 - 9601596
Waktu Pengambilan Sampel	Periode I : 24 – 25 April 2009 Periode II : 19 – 20 Nopember 2009		

Tabel C.1.2.1.2. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Kusan

No.	Parameter	Sat.	BMA Per. Gub. Kal-Sel No. 05/2007	Lokasi Sampling DAS Kusan					
				Hulu		Tengah		Hilir	
				I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Fisika</b>								
1	Temperatur	°C	Dev 3	28.2	28.3	29.2	28.8	30.8	29.3
2	TDS ***	mg/L	1000	71.4	76.4	77.8	63.7	105.8	170
3	TSS ***	mg/L	50	26	45	31	62	22	43
4	DHL	µS/m	-	142	159.1	157.4	126.4	211.8	344
5	Turbiditas	NTU	-	334	>1000	840	269	98	94
	<b>Kimia Anorganik</b>								
1	pH ***	mg/L	6 - 9	7.71	6.92	6.94	6.93	6.5	6.72
2	BOD ***	mg/L	2	5.09	10.5	6.24	8.1	4.8	33
3	COD ***	mg/L	10	11.35	20.9	14.35	11.25	11.05	78.77
4	DO ***	mg/L	Min 6	5.63	3.84	5.52	3.55	9.25	3.59
5	Kadmium	mg/L	0,1	0.0159	<0.001	0.0268	<0.001	0.0188	0.005
6	Tembaga	mg/L	0,02	0.0199	0.019	0.03	0.027	0.0205	0.034
7	Besi	mg/L	0,3	0.3589	1.988	0.4036	2.079	0.1946	0.857
8	Timbal	mg/L	0,3	<0,002	<0,001	<0,002	<0,001	<0,002	0.243
9	Mangan	mg/L	0,1	0.2295	0.228	0.5267	0.237	0.1712	0.0070
10	Air Raksa	mg/L	0.001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
11	Salinitas	mg/L	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.9
	<b>Kimia Organik</b>								
12	Minyak dan lemak	mg/L	1	<0,005	3	<0,005	2	<0,005	0.007

### C.1.2.2. Analisa Kualitas Air pada DAS Satui Tahun 2009

Tabel C.1.2.2.1. Data Sampel air pada daerah aliran sungai Satui

Kegiatan	Titik Pengambilan Sampel		
	Titik I	Titik II	Titik III
Lokasi Pengambilan Sampel	Simpang Tiga Sei. Satui – Sei. Batulaki Desa Jombang Kecamatan Satui	Jembatan Sei. Danau Desa Satui Timur Kecamatan Satui	Sekitar Pelsus Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui
Titik Koordinat Pengambilan Sampel	0324514 - 9586172	0322999 - 9582208	0325704 - 9583425
Waktu Pengambilan Sampel	Periode I : 03 – 04 April 2009 Periode II : 25 – 26 Nopember 2009		

Tabel C.1.2.2.2. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Satui

No.	Parameter	Sat.	BMA Per. Gub. Kal-Sel No. 05/2007	Lokasi Sampling DAS Satui					
				Hulu		Tengah		Hilir	
				I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Fisika</b>								
1	Temperatur	°C	Dev 3	30	29.8	28.6	29.3	29.7	30.1
2	TDS ***	mg/L	1000	53	91	60	95.6	86.1	5.87
3	TSS ***	mg/L	50	0.25	519	0.354	203	0.358	52
4	DHL	µS/m	-	109	184	121.1	191.7	171.3	11.72
5	Turbiditas	NTU	-	107	67	366	75	136	37.6
	<b>Kimia Anorganik</b>								
1	pH ***	mg/L	6 - 9	6.8	6.7	6.8	6.73	7.26	7.11
2	BOD ***	mg/L	2	8.67	11.4	10.14	8.1	9.04	10.5
3	COD ***	mg/L	10	19.24	28.94	22.52	17.68	20.06	20.9
4	DO ***	mg/L	Min 6	7.74	3.23	6.07	2.96	10.53	3.11
5	Kadmium	mg/L	0,1	0.0094	<0.001	0.0096	0.001	0.0532	<0.001
6	Tembaga	mg/L	0,02	0.0515	0.055	0.0097	0.06	0.0261	0.024
7	Besi	mg/L	0,3	0.0853	8.537	0.352	7.395	0.253	3.077
8	Timbal	mg/L	0,3	0.1815	<0.001	0.0871	<0.001	0.0755	<0.001
9	Mangan	mg/L	0,1	0.1483	0.692	0.2519	0.501	0.2593	0.057
10	Air Raksa	mg/L	0.001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0.58	<0,0001	<0,0001
11	Salinitas	mg/L	-	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	22.8
	<b>Kimia Organik</b>								
12	Minyak dan lemak	mg/L	1	<0,005	9	<0,005	4	<0,005	2

### C.1.2.3. Analisa Kualitas Air pada DAS Batulicin Tahun 2009

Tabel C.1.2.3.1. Data Sampel air pada daerah aliran sungai Batulicin

Kegiatan	Titik Pengambilan Sampel		
	Titik I	Titik II	Titik III
Lokasi Pengambilan Sampel	Sungai Sela Mentewe Desa Suka Damai Kec. Mentewe	Jembatan Karang Bintang Ds. Karang Bintang Kec. Karang Bintang	Jembatan Desa Batulicin Kec. Batulicin
Titik Koordinat Pengambilan Sampel	0362766 - 9637031	0379571 - 9624583	0386154 - 9618995

Waktu Pengambilan Sampel	Periode I : 27 April 2009 Periode II : 23 November 2009
--------------------------	--

Tabel C.1.2.3.2. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Batulicin

No.	Parameter	Sat.	BMA Per. Gub. Kal-Sel No. 05/2007	Lokasi Sampling DAS Satu					
				Hulu		Tengah		Hilir	
				I	II	I	II	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Fisika</b>								
1	Temperatur	°C	Dev 3	29.9	30.6	31	28.7	31.3	29.5
2	TDS ***	mg/L	1000	98.5	128.1	81.9	111.5	34	5.33
3	TSS ***	mg/L	50	40	204	74	90	22	68
4	DHL	µS/m	-	196.6	257.1	164.3	228.8	33.8	10.69
5	Turbiditas	NTU	-	91	154	94	244	10	68
	<b>Kimia Anorganik</b>								
1	pH ***	mg/L	6 - 9	7.42	7.02	7.54	6.67	7.38	6.58
2	BOD ***	mg/L	2	4.08	10.5	4.22	11.4	4.8	40.8
3	COD ***	mg/L	10	9.17	22.51	9.5	24.11	11.05	88.42
4	DO ***	mg/L	Min 6	7.42	4.34	11.49	3.8	10.51	3.51
5	Kadmium	mg/L	0,1	0.0178	0.001	0.0228	<0.001	0.0188	0.01
6	Tembaga	mg/L	0,02	0.0256	0.032	0.0293	0.019	0.0205	0.032
7	Besi	mg/L	0,3	0.156	6.523	0.247	4.261	0.195	1.778
8	Timbal	mg/L	0,3	<0,002	<0.001	<0,002	<0.001	<0,002	<0.001
9	Mangan	mg/L	0,1	0.123	1.15	0.1086	0.118	0.1712	0.066
10	Air Raksa	mg/L	0.001	<0,0001	0.041	<0,0001	0.028	<0,0001	0.047
11	Salinitas	mg/L	-	0.6	0.6	0.5	0.6	65.2	20.7
	<b>Kimia Organik</b>								
12	Minyak dan lemak	mg/L	1	<0,005	3	<0,005	2	<0,005	3

Analisa kualitas air sungai pada tahun 2009 merupakan lanjutan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun sebelumnya, dimana kegiatan monev tersebut rutin dilaksanakan mulai tahun 2006 sampai dengan saat ini pada DAS yang sama dan titik pengambilan sampel yang sama. Sebagai perbandingan kondisi kualitas air DAS pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut hasil analisa kualitas air DAS pada tahun 2008 :

#### C.1.2.4. Analisa Kualitas Air pada DAS Kusan Bulan Oktober Tahun 2008

Tabel C.1.2.4.1. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Kusan

No.	Parameter	Satuan	BMA Per. Gub. Kal-Sel No. 05/2007	Lokasi Sampling DAS Kusan		
				Hulu	Tengah	Hilir
	<b>FISIKA</b>					
1	Temperatur ***	°C	Dev 3 (dari Suhu alamiah)	29	28,5	30,1
2	TDS ***	mg/L	1000	90,70	92,50	87,10
3	TSS ***	mg/L	50	44	68	5
4	DHL	µS/m	-	191,5	144,8	177,8
5	Turbiditas	NTU	-	110	131	128

<b>KIMIA ANORGANIK</b>						
1	pH ***	mg/L	6 - 9	7,62	7,53	7,13
2	BOD ***	mg/L	2	8,17	5,49	5,32
3	COD ***	mg/L	10	20,43	13,74	13,31
4	DO ***	mg/L	Min 6	10,29	11,79	11,17
5	Kadmium	mg/L	0,1	<0,002	<0,002	0,0104
6	Tembaga	mg/L	0,02	-	-	-
7	Besi	mg/L	0,3	-	-	-
8	Timbal	mg/L	0,3	0,198	0,0374	0,0498
9	Mangan	mg/L	0,1	0,1853	0,1557	0,1496
10	Air Raksa	mg/L	0.001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
11	Salinitas	mg/L	-	0,6	0,5	0,5
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
1	Minyak dan lemak	mg/L	1	< 0,01	< 0,01	< 0,01

### C.1.2.5. Analisa Kualitas Air pada DAS Satui Bulan Agustus Tahun 2008

Tabel C.1.2.5.1. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Satui

No.	Parameter	Satuan	BMA Per. Gov. Kal-Sel No. 05/2007	Lokasi Sampling DAS Satui		
				Hulu	Tengah	Hilir
<b>FISIKA</b>						
1	Temperatur ***	°C	Dev 3 (dari Suhu alamiah)	28.8	30.5	27.5
2	TDS ***	mg/L	1000	74.1	55.7	58.6
3	TSS ***	mg/L	50	29	35	54
4	DHL	µS/m	-	156.2	111.1	147.1
5	Turbiditas	NTU	-	56	60	86
<b>KIMIA ANORGANIK</b>						
1	pH ***	mg/L	6 - 9	7,46	7,75	7,20
2	BOD ***	mg/L	2	8,21	7,83	8,34
3	COD ***	mg/L	10	20,53	19,58	20,85
4	DO ***	mg/L	Min 6	2,73	2,02	3,03
5	Kadmium	mg/L	0,1	<0.002	<0.002	<0.002
6	Tembaga	mg/L	0,02	<0.002	<0.002	<0.002
7	Besi	mg/L	0,3	0.1127	0.1502	0.2693
8	Timbal	mg/L	0,3	<0.002	<0.002	<0.002
9	Mangan	mg/L	0,1	0.0240	0.0404	0.0521
10	Air Raksa	mg/L	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
11	Salinitas	mg/L	-	0,2	0,4	0,4
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
1	Minyak dan lemak	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01

### C.1.2.6. Analisa Kualitas Air pada DAS Batulicin Bulan Juli Tahun 2008

Tabel C.1.2.6.1. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Batulicin

No.	Parameter	Satuan	BMA Per. Gub. Kal-Sel No. 05/2007	Lokasi Sampling DAS Batulicin		
				Hulu	Tengah	Hilir
<b>FISIKA</b>						
1	Temperatur ***	°C	Dev 3 (dari Suhu alamiah)	28,8	29,3	27,8
2	TDS ***	mg/L	1000			
3	TSS ***	mg/L	50	38	60	120
4	DHL	µS/m	-	331	118	156,4
5	Turbiditas	NTU	-	71	152	177
<b>KIMIA ANORGANIK</b>						
1	pH ***	mg/L	6 - 9	7,63	7,44	7,61
2	BOD ***	mg/L	2	19.49	6.49	7.07
3	COD ***	mg/L	10	48.74	16.24	17.68
4	DO ***	mg/L	Min 6	2,70	2,68	2,69
5	Kadmium	mg/L	0,1	<0.002	<0.002	0.0112
6	Tembaga	mg/L	0,02	<0.002	<0.002	<0.002
7	Besi	mg/L	0,3	0.2086	1.2603	0.3653
8	Timbal	mg/L	0,3	<0.002	<0.002	<0.002
9	Mangan	mg/L	0,1	0.0825	0.0082	0.0028
10	Air Raksa	mg/L	0.001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
11	Salinitas	mg/L	-	0.7	0.4	0.5
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
1	Minyak dan lemak	mg/L	1	< 0,01	< 0,01	< 0,01

Secara umum dapat dilihat kondisi kualitas air pada 3 (tiga) DAS di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2009 yang diperbandingkan dengan hasil analisa tahun 2008 adalah :

1. Dari hasil analisa kualitas air di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi Sungai Kusan, Sungai Satui dan Sungai Batulicin ada beberapa parameter penting yang mengalami perubahan konsentrasi, dimana sebagian menurun dan ada yang sebagian yang meningkat konsentrasinya, seperti konsentrasi BOD, COD, minyak dan lemak dan logam-logam berat seperti Tembaga (Cu) serta Mangan (Mn), Air Raksa (Hg) dan Besi (Fe) sudah sangat mengkhawatirkan, mengingat konsentrasi pada beberapa parameter tersebut sudah melebihi Baku Mutu Air yang diperbolehkan. Begitu juga dengan parameter DO, hasilnya tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009 kadar DO pada semua DAS mengalami penurunan dari baku mutu yang dipersyaratkan, khususnya pada pemantauan DAS periode II. Hal ini diindikasikan adanya pengaruh perubahan iklim yang tidak menentu dan diperparah dengan makin banyaknya kegiatan eksploitasi SDA yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya DAS.
2. Konsentrasi parameter – parameter kualitas air yang melebihi Baku Mutu Kualitas Air (tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan), meliputi : DO (Oksigen Terlarut), BOD (Biological Oxygent Demand), COD (Chemical Oxygent Demand), Minyak Lemak dan

Logam – logam seperti Mn (Mangan) dan Cu (Tembaga), Air raksa (Hg), Besi (Fe), baik pada Sungai Kusan, Sungai Satui maupun pada Sungai Batulicin.

3. Dapat disimpulkan peruntukan Sungai Kusan, Sungai Satui dan Sungai Batulicin sebagai Air Baku untuk pengolahan air minum dinilai kurang layak, mengingat konsentrasi logam – logam berat seperti Mn (Mangan), Fe (Besi), Air Raksa (Hg) dan Tembaga (Cu) sudah mencemari perairan tersebut.

Kecenderungan debit air pada DAS lingkup Kabupaten Tanah Bumbu yang mengalami fluktuatif yang signifikan selain disebabkan pengaruh musim hujan dan musim kemarau, diantaranya juga disebabkan oleh adanya tekanan jumlah penduduk yang semakin besar, perluasan dan pengembangan areal industri, alih fungsi lahan dan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) serta perambahan hutan tanpa ijin (*illegal logging*) yang tanpa mengindahkan fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan (*Lift buffer*). Pemecahan masalah untuk hal tersebut di atas data dan informasi indikator lingkungan yang lengkap dan valid khususnya kualitas air sangat penting dilakukan sebagai salah satu acuan status lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.

Melihat kondisi kualitas sumber daya air di Kabupaten Tanah Bumbu yang cenderung mengalami penurunan walaupun masih dalam batas normal, maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu merespon keadaan tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih berat. Adapun kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi hal-hal yang disebutkan diatas, dilakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL agar dalam pengelolaan industri harus mengelola limbah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menindak tegas terhadap pelaku illegal logging, menertibkan penambang-penambang tanpa ijin kemudian dilakukan pembinaan agar dalam melakukan kegiatannya selalu mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan serta memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di sungai-sungai.



Gambar 3. Kondisi Sumber Daya Air DAS Satui dan Kusan



Gambar 4. Pengambilan Sampel Air



Gambar 5. Analisa Parameter Insitu Sampel Air

## D. UDARA

### D.1. Kondisi Kualitas Udara

Udara mempunyai arti penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumberdaya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Hal ini berarti pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) sedangkan pengendaliannya selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dan batasan baku mutu udara.

Status mutu udara ambien daerah merupakan mutu udara ambien yang menggambarkan keadaan kualitas udara ambien di suatu lokasi pada waktu tertentu. Kondisi udara Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam ambang normal, kondisi terburuk hanya terjadi pada musim kemarau yaitu adanya peningkatan kadar debu sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu tetapi setelah masuk musim hujan kondisi peningkatan kadar debu tersebut sudah berkurang.

Dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan kadar debu pada musim kemarau adalah berkurangnya jarak pandang karena terhalang oleh debu aktivitas lalu lintas khususnya dari truk-truk pengangkut muatan batubara/bijih besi maupun kelapa sawit, terjadinya iritasi pada mata dan terganggunya saluran pernapasan. Hal ini berakibat terganggunya aktivitas masyarakat, industri dan dunia usaha yang juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagai gambaran umum kondisi kualitas udara yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu baik di daerah tambang maupun pemukiman dapat dilihat dari hasil pengukuran kualitas udara (tabel D.1.1. dan D.1.2.) pada kegiatan pertambangan di PT. Arutmin Indonesia Site Batulicin. Berikut hasil perbandingan pengukuran kualitas udara dan kebisingan pada daerah tambang dan pemukiman PT. Arutmin Indonesia pada tahun 2008 dan 2009.

Tabel D.1.1. Perbandingan hasil pengukuran dan analisa kualitas udara di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 dan 2009

No.	Lokasi Pemantauan	PP No. 41/1999 (Pengendalian Pencemaran Udara)	Kadar Debu ( $\mu\text{m}^3$ ) per Triwulan	
			Tw III/08	Tw II09
1	Desa Batu Harang	230,00 $\mu\text{m}^3$	227,42	375,30
2	Jalan angkut Km. 58 Mantewe		178,25	313,46
3	Jalan angkut Km. 50 Mantewe		120,28	581,04
4	Jalan angkut Km. 33		186,67	389,91
5	Jalan angkut Km. 17		218,64	787,46
6	Jalan angkut Km. 10 Sari Gadung		240,18	174,67
7	Tambang Ata Utara - BWM		228,24	2.752,29
8	Tambang Ata Selatan - CK		326,26	4.882,97
9	Tambang Pit 2 Mangkalapi - CK		345,18	790,96
10	Tambang Pit 3 Mangkalapi - CK		387,65	322,84
11	Tambang Mereh		108,15	542,81
12	Simpang Pelabuhan CV BA		187,64	327,51
13	Simpang Pelabuhan Kodeco (BWM)		286,14	247,45
14	Desa Miing		226,78	543,45

Sumber : Laporan Triwulan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Site Batulicin Tahun 2008 dan 2009

Dari data pada tabel D.1.1 terlihat bahwa setiap tahunnya, kadar debu di beberapa lokasi sepanjang jalan angkutan, lokasi tambang yang sedang beroperasi dan daerah pemukiman melebihi baku mutu menurut PP. No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Tingginya kadar debu pada beberapa lokasi pemantauan sangat ditentukan oleh aktifitas setempat, kondisi lokal dan kondisi cuaca saat pengukuran. Pada lokasi-lokasi yang kadar debunya melampaui baku mutu, umumnya kondisi lokasi kering dan cuaca yang panas, walaupun aktifitas lalu lintas kendaraan kecil, namun bisa juga menyebabkan dispersi debu yang cukup besar ke udara. Sumber lain dari tingginya kadar debu yaitu berasal dari penumpukan batubara dan peremukan batubara pada *Crusher Plant*.

Tabel D.1.2. Perbandingan hasil pengukuran tingkat kebisingan pada kawasan Industri dan pemukiman di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 dan 2009

No.	Lokasi Pemantauan	Kep.Men/LH No.48/MENLH/11/1996 (Baku Mutu Tingkat Kebisingan)	Kebisingan (dBA)	
			Tw III/08	Tw II09
1	Desa Batu Harang		54	51,2
2	Jalan angkut Km. 58 Mantewe		52	48,3
3	Jalan angkut Km. 50 Mantewe		46	56,4
4	Jalan angkut Km. 33		55	48,4
5	Jalan angkut Km. 17		54	57,2
6	Jalan angkut Km. 10 Sari Gadung	<b>70 dB Untuk Kawasan Industri</b>	58	57,3
7	Tambang Ata Utara - BWM		62	61,3
8	Tambang Ata Selatan - CK	<b>55 dB Untuk Kawasan Pemukiman</b>	68	72,7
9	Tambang Pit 2 Mangkalapi - CK		72	73,1
10	Tambang Pit 3 Mangkalapi - CK		62	63,7
11	Tambang Mereh		51	71,9
12	Simpang Pelabuhan CV BA		51	59,5
13	Simpang Pelabuhan Kodeco (BWM)		62	58,4
14	Desa Miing		52	48,9

Sumber : Laporan Triwulan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Site Batulicin Tahun 2008 dan 2009

Hasil pengukuran kebisingan pada beberapa lokasi kegiatan pertambangan batubara dan daerah pemukiman mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Dari data yang ada pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa kebisingan pada beberapa lokasi di kawasan Industri (Tambang Ata Selatan – CK, Tambang Pit 2 Mangkalapi – CK, Tambang Pit 2 Mangkalapi – CK dan Tambang Mereh) melebihi baku mutu menurut Kepmen LH No. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Sedangkan tingkat kebisingan pada daerah pemukiman (Desa Batu Harang dan desa Miing) mengalami penurunan angka kebisingan. Tingginya tingkat kebisingan sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan lalu lintas yaitu kegiatan jalan negara, adanya kegiatan pengangkutan batubara, operasional alat berat dan operasional genset di lokasi tambang. Sedangkan kebisingan di lokasi pemukiman

dipengaruhi oleh aktifitas masyarakat dan aktifitas di jalan desa. Kebisingan di atas 55 dBA untuk kawasan perumahan dan diatas 70 dBA untuk kawasan industri sudah dapat dianggap sebagai kebisingan yang perlu mendapat perhatian karena sudah mengganggu kenyamanan pendengaran. Kebisingan yang terukur pada masing-masing lokasi bersumber utama dari kegiatan pengangkutan batubara dan kegiatan tambang.

Sumber lain menurunnya kualitas udara yang berasal dari sektor bangunan yaitu pembangunan ruko dan pemukiman baru yang memberi dampak terhadap peningkatan suhu perkotaan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Sedangkan pada sub sektor peternakan kotoran ternak menimbulkan bau yang tidak sedap dapat mencemari udara dan mengganggu pernafasan.

Dari hasil pengukuran kualitas udara tersebut, menunjukkan betapa besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan/usaha ke lingkungan sekitar. Mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi dan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara, maka perlu adanya upaya nyata dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merespon pencemaran udara khususnya debu pada musim kemarau antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar, menegaskan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan agar dalam langkah kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara serta menindak tegas pelaku usaha atau anggota masyarakat yang melanggar ketentuan sehingga menimbulkan pencemaran udara



Gambar 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Oleh PT. Satui Baratama Untuk Menanggulangi Peningkatan Kadar Debu Di Sekitar Jalan Angkut

## E. LAUT, PESISIR DAN PANTAI

### E.1. Kondisi Umum Pesisir dan Laut

Sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada di sekitar wilayah laut dan pesisir. Hal ini juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang banyak menggantungkan hidup dari hasil laut dengan menjadi nelayan atau petani kolam/tambak. Dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, 6 (enam) Kecamatan diantaranya berada disekitar pesisir dan laut dengan jumlah desa 30 (tigapuluh). Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

Secara umum kondisi kawasan pesisir dan laut di Kabupaten Tanah Bumbu belum terindikasi pencemaran akibat industri atau kegiatan usaha lainnya, tetapi potensi kerusakan yang terjadi di pesisir dan laut sudah mulai terlihat, diantaranya kerusakan ekosistem bakau (mangrove) akibat adanya pembukaan areal tambak rakyat yang tak terkendali, penebangan kayu baku untuk bahan bangunan dan arang, konversi areal mangrove untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan khusus pengangkutan batu bara serta kerusakan pesisir dan laut lainnya.

Berdasarkan data dari dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu kondisi tingkat kerusakan mangrove pada tahun 2008 dan tahun 2009 tidak terlalu jauh berbeda. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel E.1.1. Potensi Ekosistem Mangrove

No.	Kecamatan	Potensi Ekosistem Mangrove					
		Tahun 2008			Tahun 2009		
		Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Berat (Ha)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Simp. Empat	5.216,60	724,50	340,20	5.216,00	519,50	235,00
2	Batulicin	1.424,60	384,00	291,10	1.424,60	384,00	291,10
3	Kusan Hilir	1299	333	352	1.298,00	333,00	354,00
4	Sei. Loban	2.952,00	237,00	636,00	2.952,00	237,00	636,00
5	Angsana	2217	516,5	15	2.217,00	516,50	15,00
6	Satui	4430,5	1406	538	4.430,50	1.406,00	538,00
<b>Total</b>		<b>17.539,7</b>	<b>3.601,0</b>	<b>2.172,3</b>	<b>17.538,10</b>	<b>3.396,00</b>	<b>2.069,10</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel E.1.2. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

No	Kec.	Luas Tutupan (ha) 2008	Luas Tutupan (ha) 2009	Persentase Luas Tutupan (%)							
				Tahun 2008				Tahun 2009			
				Sngt Baik	Baik	Sedang	Rusak	Sngt Baik	Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sei.Loban	165	165	0	23,72	14,74	7,31	-	99	-	27
2	Angsana	82,5	82,5	0	10,34	7,37	2,74	-	49,5	-	33

3	Satui	82,5	82,5	0	13,99	7,37	1,47	-	30	30	52,5
<b>Jumlah</b>		<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>48,1</b>	<b>26,5</b>	<b>11,5</b>	<b>-</b>	<b>148,5</b>	<b>30</b>	<b>112,5</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

Dari data pada tabel E.1.1. terlihat bahwa pada beberapa kecamatan ada yang mengalami penurunan kerusakan ekosistem mangrove meskipun angka penurunannya sangat kecil. Sedangkan pada tabel E.1.2. terlihat bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 meskipun luas tutupan lahan tidak ada perubahan namun terlihat angka presentase luas tutupan dan kondisi terumbu karang sedikit mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain sudah digalakkannya berbagai macam program pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Daerah tetapi masih banyak kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adanya potensi kerusakan mangrove tersebut jelas sangat mengganggu fungsi ekologi hutan mangrove sebagai perangkap sedimen dan merupakan habitat berbagai jenis satwa baik sebagai habitat pokok maupun sebagai habitat sementara dan juga dari fungsi ekonomis, dapat bermanfaat sebagai sumber penghasil kayu, bahan arang, alat tangkap ikan dan sumber bahan lain seperti tannin dan pewarna. Mangrove juga mempunyai peran penting sebagai pelindung pantai dari hempasan gelombang air laut. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sangatlah penting untuk kesejahteraan manusia dan memerlukan perhatian dan kepedulian dari Pemerintah Daerah setempat maupun masyarakat sekitar.

Beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan pesisir dan pantai diantaranya adalah pembuatan kolam dan tambak di wilayah pesisir, penggundulan hutan di daerah hulu dan kegiatan pengembangan di daerah pantai yang tidak mengindahkan dinamika pantai, kegiatan kehutanan yang sering menggunakan sungai sebagai transportasi untuk mendistribusikan hasil-hasil kayunya dan kegiatan pertambangan liar (*illegal mining*) yang menggunakan merkuri yang di buang ke sungai dan akhirnya sampai ke laut akan menyebabkan polusi bagi ekosistem laut (mengakibatkan terjadinya erosi dan sedimentasi), meningkatnya aktifitas lalu lintas air dan adanya ceceran minyak yang mengakibatkan terganggunya ekosistem biota perairan dan kebisingan bagi fauna sekitarnya, pembangunan sarana prasarana pelabuhan khusus yang kurang memperhatikan tata ruang, sehingga kawasan konservasi khususnya terumbu karang di Desa Bunati Kecamatan Angsana dan Desa Sei. Loban Kecamatan Sei. Loban kurang terlindungi serta pembuangan limbah rumah tangga, industri, dan lain-lain, yang tidak mengikuti kaidah lingkungan menyebabkan air laut mudah tercemar, kegiatan pelabuhan dan kapal nelayan yang sering keluar masuk menuju laut.

Dampak utama yang ditimbulkan sebagai akibat dari kerusakan pesisir dan laut adalah terjadinya abrasi di pesisir, terganggunya ekosistem perairan, berpindahnya ground fishing, berkurangnya tempat berlindung dan bertelur ikan, udang dan kepiting, serta adanya keluhan masyarakat tentang tingginya kadar timbal (Pb) di tambak yang mengakibatkan kegagalan panen ikan.

Melihat kondisi kerusakan pesisir dan pantai di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya dengan mengurangi aktifitas pembukaan tambak serta pembinaan pola tambak yang ramah lingkungan, tidak lagi mengizinkan pembuatan tambak baru dan mengembangkan budidaya keramba, mulai menanam kembali hutan mangrove yang rusak dan membentuk Kelompok Peduli Hutan Mangrove, pembuatan revertment di sepanjang bibir pantai pada area perairan pelabuhan pemuatan atau pelabuhan khusus untuk mengurangi peningkatan laju abrasi, pengurangan buangan limbah yang masuk pesisir dengan cara pemanfaatan teknologi bersih (*clean technology atau low and no waste technologies*), merehabilitasi hutan mangrove yang rusak melalui penghijauan, peremajaan pantai dan merehabilitasi ekosistem mangrove, melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengkajian pengelolaan sumberdaya dan pemulihan ekosistem pesisir, dan laut, sehingga pembangunan dan pemanfaatannya berbasis masyarakat dan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada. Salah satunya pembentukan kelompok pelestari mangrove di beberapa desa di Kabupaten Tanah Bumbu yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove



Gambar 7. Kondisi Ekosistem Mangrove



Gambar 8. Kondisi Kerusakan Ekosistem Mangrove

## F. IKLIM

### F.1. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di Tanah Bumbu dikelompokkan sebagai *Afaw* yaitu iklim *isothermal* hujan tropis dengan musim kemarau yang panas. Ketinggian tempat bervariasi antara 0 – 1000 meter di atas permukaan laut, namun secara umum wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berada pada ketinggian 25 –100 meter di atas permukaan laut. Data lengkap mengenai perbandingan kondisi suhu udara rata-rata bulanan dan data curah hujan rata-rata bulanan Kabupaten Tanah Bumbu tersaji pada tabel berikut :

Tabel F.1.1. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kabupaten	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)											
		Okt 08	Nov 08	Des 08	Jan 09	Feb 08	Mar 09	Apr 09	Mei 09	Jun 09	Jul 09	Agt 09	Sep 09
1	Tanah Bumbu	8.0	5.4	4.5	11.1	7.0	5.9	3.9	3.4	2.4	1.9	0.4	0.0
<b>TOTAL</b>		<b>8.0</b>	<b>5.4</b>	<b>4.5</b>	<b>11.1</b>	<b>7.0</b>	<b>5.9</b>	<b>3.9</b>	<b>3.4</b>	<b>2.4</b>	<b>1.9</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>

Tabel F.1.2. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kabupaten	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Okt 08	Nov 08	Des 08	Jan 09	Feb 08	Mar 09	Apr 09	Mei 09	Jun 09	Jul 09	Agt 09	Sep 09
1	Tanah Bumbu	26.6	27.1	26.6	26.3	26.7	26.7	27.4	27.2	26.6	26.3	26.8	27.3
<b>TOTAL</b>		<b>26.6</b>	<b>27.1</b>	<b>26.6</b>	<b>26.3</b>	<b>26.7</b>	<b>26.7</b>	<b>27.4</b>	<b>27.2</b>	<b>26.6</b>	<b>26.3</b>	<b>26.8</b>	<b>27.3</b>

Keterangan : Tahun data pada bulan Oktober 2008 s.d. bulan September 2009  
Karena Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki Stasiun Meteorologi sendiri maka data curah hujan rata-rata bulanan dan suhu rata-rata bulanan diambil dari Stasiun Meteorologi Stagen Kotabaru sebagai Kabupaten terdekat dari Kab. Tanah Bumbu

Sumber : Stasiun Meteorologi Stagen Kotabaru

Dari hasil pantauan Stasiun Meteorologi Stagen, selama kurun waktu antara oktober 2008 sampai dengan September 2009 kelembaban udara rata – rata berkisar 85 persen dengan kelembaban maksimum tertinggi sebesar 96 persen dan kelembaban minimum terendah sebesar 75 persen. Sedangkan temperatur udara rata – rata antara oktober 2008 sampai dengan September 2009 berkisar 26,8<sup>0</sup> C, dengan suhu udara maksimum tertinggi sebesar 34,6<sup>0</sup>C dan minimum terendah sebesar 19,6<sup>0</sup> C. Rata-rata curah hujan/tahun adalah 12,4 mm, curah hujan minimal dan maksimal antara 34,5 mm dan 2 mm. Curah Hujan tertinggi terjadi di bulan Januari yaitu 11,1 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dan intensitas penyinaran matahari dapat disimpulkan bahwa musim penghujan selama kurun waktu antara oktober 2008 sampai dengan September 2009 terjadi pada selang waktu bulan Oktober 2008 sampai Januari 2009. Sebaliknya musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga September 2009.

## **G. BENCANA ALAM**

### **G.1. Kondisi Geografis Kabupaten Tanah Bumbu dan Keterkaitannya Dengan Terjadinya Bencana Alam, Korban serta Taksiran Kerugiannya**

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 2°52' – 3°47' LS dan 115°15' – 116°4' BT dengan batas - batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Tanah Laut dan Kab. Banjar

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km<sup>2</sup> (506.696 Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 31,76 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 110,42 Km<sup>2</sup> atau hanya 2,18 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut – turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.

Sungai Utama yang ada di Tanah Bumbu terdiri dari 8 Sungai yaitu : Sungai Batulicin, Sungai Kusan, Sungai Satui, Sungai Sebanban, Sungai Dua Laut, Sungai Langawan, Sungai Kumpang, Sungai Betung. Panjang pantai ± 158,7 km dengan luas perairan ± 640,9 km<sup>2</sup>. Secara umum pola sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah berpola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan secara merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan sedemikian tinggi hingga berpotensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir sungai dari DAS Tanah Bumbu (DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin). Kondisi geografis Kabupaten Tanah Bumbu yang demikian, ditambah dengan banyaknya kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, pelsus, kegiatan masyarakat lainnya maupun karena perubahan iklim yang ekstrim, mendukung terjadinya bencana seperti banjir dan kebakaran.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2007 setidaknya terdapat 6.506 KK/29.777 jiwa masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir pada 7 kecamatan. Sedangkan pada tahun 2008 kejadian banjir semakin meluas pada 42 desa dengan jumlah korban mengungsi 7.298 KK/ 30.757 jiwa dan korban meninggal 3 jiwa. Berdasarkan kondisi riil di lapangan, bahwa beberapa kecamatan/desa di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi langganan kedatangan banjir pada setiap musim hujan, seperti Kecamatan Satui dan Kusan Hulu, seperti yang terjadi pada juni tahun 2006 dan tahun 2008. Pada tahun 2008 telah terjadi dua kali banjir yaitu pada bulan agustus dan september akibat dari hujan berkepanjangan di Pegunungan Meratus sehingga mengakibatkan meluapnya sungai Kusan dan menggenangi desa-desa di sepanjang daerah aliran sungai

Mengingat keterbatasan data yang didapat dari dinas/instansi terkait mengenai data bencana selain data banjir seperti data kebakaran hutan/lahan, gempa bumi, kekeringan dan tanah longsor, maka data bencana yang dapat diperbandingkan kejadiannya setiap tahunnya hanya data bencana banjir. Data tersaji pada table berikut :

Tabel G.1.1. Banyaknya Kejadian Bencana Alam, Korban dan Taksiran Kerugiannya Tahun 2007/2008

Bencana /	Frekuensi Kejadian	Korban			Taksiran Kerugian (Rp)
		KK	Jiwa	Meninggal	
1	2	3	4	5	6
1. Kebakaran	7	81	280	0	Ratusan juta
2. Banjir	7	6.506	29.977	0	Ratusan juta
3. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
4. Angin Puyuh	-	-	-	-	-

Tabel G.1.2. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Tahun 2008

No	Kecamatan	Total Area Terendam (desa)	Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
1	2	3	4	5	6
1	Satui	8 desa	1.496 KK / 7.480 Jiwa	2 Jiwa	
2	Kusan Hulu	13 desa	2.513 KK / 10.052 Jiwa	-	
3	Karang Bintang	2 desa	400 KK / 1.593 Jiwa	1 Jiwa	
4	Sungai Loban	6 desa	260 KK / 1.040 Jiwa	-	
5	Mantewe	2 desa	710 KK / 2.840 Jiwa	-	
6	Batulicin	1 desa	468 KK / 1.807 Jiwa	-	
7	Kusan Hilir	10 desa	1.451 KK / 5.695 Jiwa	-	
<b>TOTAL</b>		<b>42 desa</b>	<b>7.298 KK/ 30.757 Jiwa</b>	<b>3 Jiwa</b>	

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2007-2008

Terjadinya banjir ini, selain disebabkan karena faktor iklim yang ekstrim juga karena kondisi daya dukung DAS menurun, maka berdampak terhadap terjadinya banjir. DAS yang berdaya dukung rendah ditandai semakin mengecilnya luas areal hutan, semakin luasnya lahan terbuka atau lahan kritis akibat berbagai aktifitas masyarakat yang memanfaatkan lahan tanpa memperhatikan daya dukung lahan. Faktor pendangkalan sungai juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Pendangkalan sungai berarti terjadinya pengecilan tampang sungai, hingga sungai tidak mampu lagi mengalirkan air yang melewatinya, sehingga meluap dan terjadilah banjir. Pendangkalan sungai ini dapat disebabkan oleh sedementasi yang terjadi terus menerus, akibat erosi yang intensif dibagian

hulu. Erosi tersebut akibat rusaknya DAS pada bagian hulu karena hutan yang mengalami degradasi dan rusaknya kawasan pesisir.

Sebaliknya kondisi air tanah pada musim kemarau sangat rendah sehingga banyak penduduk yang mengalami kekurangan air, baik untuk keperluan domestik maupun pertanian terutama di daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Sei. Loban dan Angsana. Disamping itu di beberapa desa khususnya di Kecamatan Kusan Hilir yang berada 0 – 3 meter dpl, hampir setiap tahunnya terjadi intrusi air laut pada sumur penduduk dan air baku PDAM.

Selain bencana banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2009 kerap terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan data yang ada, kebakaran hutan belukar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) selama musim kemarau tahun 2009 terjadi di di kawasan Jl Dharma Praja, Kecamatan Batulicin yang mencapai sekitar 20 hektare. Kawasan hutan yang terbakar tersebut sebelumnya dipenuhi oleh semak belukar dan ribuan batang kayu galam. Kayu galam tersebut banyak dimanfaatkan untuk penyangga fondasi bangunan yang ditancapkan di dalam tanah. Selain itu, kebakaran juga dipicu oleh orang iseng yang membuang puntung rokok sembarangan. Para petugas pemadam kebakaran sudah melakukan upaya pencegahan supaya kebakaran tidak meluas. Namun, terbatasnya jumlah personel beserta peralatan dan diperparah dengan musim kemarau berkepanjangan membuat antisipasi yang telah dilakukan cenderung kurang efektif untuk mencegah kebakaran hutan. Daerah lokasi kebakaran rata-rata adalah lokasi yang masih banyak terdapat hutan belukar yang terletak di antara permukiman dan lahan pertanian. Seperti yang terjadi di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, cukup banyak hutan belukar yang berupa rerumputan dan pohon kayu galam yang berukuran kecil, sedang dan berukuran besar. Kondisi musim panas yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir pada tahun 2009 memperparah terjadinya kebakaran hutan/lahan di daerah rawan kebakaran. Penyebab lain terjadinya kebakaran hutan/lahan adalah akibat oleh pemilik lahan yang melakukan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian, pembangunan tempat pemukiman maupun kegiatan pertambangan melalui pembakaran lahan yang akhirnya meluas ke lokasi lain.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan penyebab umum dari terjadinya bencana seperti bencana banjir dan kebakaran hutan/lahan adalah disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang alang-alang dan semak belukar. Lahan seperti ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau panjang yang berdampak pada kebakaran hutan-lahan. Selain itu, penyebab lainnya adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang besar pada wilayah hilir dan penumpukan sampah di sungai.

Mengantisipasi berbagai hal tersebut, maka perlu adanya kampanye untuk tujuan pelestarian lingkungan dan penyadaran kepada masyarakat tentang dampak dari kerusakan lingkungan, revitalisasi sektor kehutanan, penegakan hukum, kerjasama pampihak yang terlibat untuk mengantisipasi bencana banjir dan kebakaran hutan-lahan dan rehabilitasi hutan-lahan secara besar-besaran.

## BAB II

### TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN

#### A. KEPENDUDUKAN

##### A.1. Informasi Jumlah, Pertumbuhan, Dan Kepadatan Penduduk, Serta Pola Migrasi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu adalah 302.302 jiwa yang terdiri dari ± 159.551 jiwa penduduk laki – laki dan ± 142.751 jiwa penduduk perempuan dengan rata – rata kepadatan penduduk adalah 45,85 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Tanah Bumbu terkonsentrasi di Kecamatan Simpang Empat, Kusan Hilir dan Satui. Lebih dari 57 persen penduduk Tanah Bumbu menempati tiga kecamatan tersebut. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi adalah di kecamatan Simpang Empat yakni 204,4751 jiwa setiap Km<sup>2</sup>. Etnis yang mendiami wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari Bugis, Banjar, Jawa, Babi, Batak, Lombok, Madura, Sunda, Ambon, Manado, Cina, Korea, Arab, Filipina dan India. Bahasa komunikasi adalah Bugis, Banjar dan Jawa. Secara umum, masyarakat Tanah Bumbu dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kerukunan dan toleransi beragama yang cukup tinggi. Agama yang dianut masyarakat Tanah Bumbu antara lain : Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Data jumlah penduduk per kecamatan dan kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 tersaji pada tabel berikut :

Tabel A.1. Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km <sup>2</sup> )
1.	Batulicin	228	15.299	67,10088
2.	Simpang Empat	301	61.547	204,4751
3.	Kuranji	93	8.651	93,02151
4.	Sungai Loban	341	23.313	68,36657
5.	Mantewe	1.016	25.954	25,54528
6.	Karang Bintang	114	22.359	196,1316
7.	Satui	880	48.209	54,78295
8.	Kusan Hulu	1.610	25.589	15,89379
9.	Angsana	152	20.735	136,4145
10.	Kusan Hilir	1.857	50.646	27,27302
<b>TOTAL</b>		<b>6.592</b>	<b>302.302</b>	<b>45,85892</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

## A.2. Informasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur Dan Status Pendidikan

Jumlah penduduk pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah penduduk adalah 301.892, ini berarti ada peningkatan sebesar 410 jiwa atau sekitar 1,001 %. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya sangat mempengaruhi besarnya tekanan terhadap lingkungan. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula limbah/buangan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, baik itu limbah domestik maupun limbah industri.

Tabel A.2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir

No.	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat
1.	Batulicin	5.940	2.629	3.269	1.576
2.	Simpang Empat	22.246	11.127	12.554	7.151
3.	Kuranji	2.904	1.782	2.167	1.053
4.	Sungai Loban	7.298	5.065	5.883	2.610
5.	Mantewe	8.463	6.211	7.136	2.819
6.	Karang Bintang	7.869	5.480	5.043	2.417
7.	Satui	16.278	8.146	10.847	6.366
8.	Kusan Hulu	9.508	6.053	6.695	1.962
9.	Angsana	7.767	2.833	4.892	2.891
10.	Kusan Hilir	15.635	11.797	12.250	5.913
<b>TOTAL</b>		<b>103.908</b>	<b>61.123</b>	<b>70.376</b>	<b>34.758</b>

Lanjutan Tabel A.2.

No.	Kecamatan	SLTA/ Sederajat	DI/DII/DIII	S1	S2
1.	Batulicin	1.447	218	196	12
2.	Simpang Empat	7.243	649	480	70
3.	Kuranji	632	77	27	4
4.	Sungai Loban	1.883	364	174	24
5.	Mantewe	1.037	181	91	7
6.	Karang Bintang	1.250	168	91	20
7.	Satui	5.984	579	305	43
8.	Kusan Hulu	1.059	230	66	6
9.	Angsana	2.082	182	83	3
10.	Kusan Hilir	3.858	610	502	56
<b>TOTAL</b>		<b>26.475</b>	<b>3.258</b>	<b>2.015</b>	<b>245</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Melihat data pada tabel A.2., banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang berarti masih terbatasnya jumlah SDM penduduk. Dari data yang ada pada tabel A.2. terlihat bahwa total keseluruhan jumlah penduduk yang pernah mengenyam bangku pendidikan, baik dari tingkat SD/ sederajat sampai tingkat Strata II adalah 137.127 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah dan tidak tamat SD/ sederajat adalah 165.031 jiwa. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya pemerataan pendidikan dan peran serta pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah pelosok. Bercocok tanam, berkebun dan melaut sejak dulu merupakan mata pencaharian primer masyarakat pedesaan dan

pesisir di Kabupaten Tanah Bumbu. Pola berfikir masyarakat pelosok masih terbelenggu pada kehidupan sekitar dan memandang pendidikan tinggi itu bukanlah hal primer bagi kehidupan anak kelak. Namun seiring dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor, ada peralihan jenis mata pencaharian misalnya dari sektor pertambangan, perkebunan, swasta dan pemerintahan, meskipun pada kenyataannya di sektor pertambangan khususnya batubara hasilnya tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena hanya dikuasai oleh segelintir orang.

## B. PEMUKIMAN

### B.1. Informasi Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan data kependudukan yang ada pada Dinas/Instansi terkait, jumlah rumah tangga di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 4.033 rumah tangga. Begitu juga dengan data jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada tabel B.1. berikut ini, angka jumlah rumah tangga miskin dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 18.632 rumah tangga. Dari data yang ada tersebut, peningkatan jumlah rumah tangga miskin mengindikasikan bahwa masih kurangnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama hal tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama di daerah pelosok akan pentingnya arti pendidikan bagi masa depan, masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur yang masih belum merata dan juga masih dikuasainya sektor perekonomian swasta seperti pertambangan dan perkebunan oleh kalangan tertentu sehingga dengan keberadaan kegiatan/usaha tersebut belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.

Tabel B.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Jumlah Rumah Tangga Miskin	
		2007/2008	2008/2009	2007/2008	2008/2009
1.	Kusan Hilir	12.027	10.258	1.499	4.518
2.	Angsana	4.139	3.875	614	2.541
3.	Kusan Hulu	4.983	4.765	1.208	2.949
4.	Mantewe	5.001	4.620	1.394	2.832
5.	Kuranji	2.170	1.903	560	1.435
6.	Sungai Loban	5.646	4.576	893	2.354
7.	Karang Bintang	4.207	13.673	1.016	1.384
8.	Simpang Empat	12.689	12.080	1.687	2.926
9.	Batulicin	3.107	2.667	380	1.835
10.	Satui	11.134	10.719	1.653	6.762
<b>Total</b>		<b>65.103</b>	<b>69.136</b>	<b>10.904</b>	<b>29.536</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

## B.2. Informasi Jumlah Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Sampah, Dan Tempat Buang Air Besar

Di Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat 3 (tiga) tempat pembuangan sampah akhir yaitu pada kecamatan Batulicin - Simpang Empat di Desa Batu Ampar, kecamatan Kusan Hilir di Pulau Salak dan kecamatan Satui di Desa Satui Barat. Dari data yang ada pada tabel B.2, ada sekitar 40.067 jumlah rumah tangga yang ada 4 (empat) kecamatan. Rata-rata pengelolaan sampah yang ada di masyarakat perkotaan adalah membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) terdekat (sekitar 303%) dan selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan setiap harinya ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Pengelolaan sampah lainnya adalah dengan cara membuat lubang galian di tanah untuk menimbun sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga (sekitar 14%). Namun masih banyak masyarakat yang mengelola sampah yang dihasilkan dengan cara membakar (35%). Biasanya sampah yang dibakar adalah sampah kering seperti dedaunan dan sampah anorganik lainnya. Pembakaran sampah tersebut dilakukan karena dipandang lebih praktis untuk mengurangi jumlah sampah domestik yang dihasilkan dari aktifitas rumah tangga sehari-hari, meskipun dampak asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut tanpa disadari sangat membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, sebagian besar dari mereka langsung membuang sampah rumah tangga ke sungai. Hal ini jelas sangat merugikan bagi kelestarian sungai sebagai sumber daya air utama di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi sumber air minum, MCK, sarana transportasi air dll, mengingat tekanan lingkungan terhadap sungai di sebagian wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sudah sangat berat, baik itu dari aktifitas masyarakat yang bermukim di bantaran sungai maupun kegiatan lainnya seperti pelabuhan, pertambangan dan perkebunan.

Tabel B.2. Jumlah Rumah Tangga dan menurut Cara Pembuangan Sampah

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Cara Pembuangan				
			Angkut (%)	Timbun (%)	Bakar (%)	Ke Kali (%)	Lainnya (%)
1.	Simpang Empat	14.391	75	2	10	8	5
2.	Batulicin	3.297	70	2	15	8	5
3.	Pagatan	11.431	78	3	5	10	4
4.	Satui	10.948	80	7	5	4	4
<b>Total</b>		<b>40.067</b>	<b>303</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>18</b>

Sumber : Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009 seperti yang tersaji pada tabel B.3., terdapat total 65.609 jumlah kepala keluarga yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagian rumah tangga sudah memiliki tempat buang air besar permanen, khususnya pada daerah pemukiman di perkotaan. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan ada peningkatan jumlah tempat buang air besar yang dimiliki sendiri oleh setiap KK.

Sedangkan tempat buang air besar yang dimiliki bersama maupun umum mengalami sedikit penurunan jumlahnya, antara lain disebabkan karena kurangnya perawatan/pemeliharaan oleh pemakai sehingga mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi lagi.

Jika ditinjau dari jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tanki septic tank di Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2008 terdapat 198 jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tanki septic tank, dan pada tahun 2009 jumlahnya meningkat menjadi 291 jumlah rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki tanki septic tank adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman sekitar bantaran sungai. Rata-rata penduduk memanfaatkan air sungai untuk sarana mencuci, mandi maupun buang air besar. Begitu juga pada masyarakat di sekitar pesisir pantai. Tempat buang air besar yang dibuat hanya seadanya yang bejarak tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Tabel B.3. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Tempat Buang Air Besar					
			Sendiri		Bersama		Umum	
			2008	2009	2008	2009	2008	2009
1.	Kusan Hilir	11.041	8317	8.337	8	6	10	10
2.	Sei. Loban	4.768	460	477	10	7	6	5
3.	Satui	10.142	3296	3.297	7	7	9	8
4.	Angsana	3.955	2050	2.149	9	7	7	5
5.	Lasung	4.703	2553	2.556	12	9	4	4
6.	Karang Bintang	7.120	1223	1.223	6	6	6	6
7.	Batulicin	3.112	651	1.050	11	8	13	10
8.	Simpang Empat	16.772	2713	2.816	15	15	15	15
9.	Kuranji	1.998	0	0	0	0	0	0
10.	Mantewe	1.998	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>65.609</b>	<b>21.263</b>	<b>21.905</b>	<b>78</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>63</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

## C. KESEHATAN

### C.1. Informasi Usia Harapan Hidup, Angka Kelahiran, Angka Kematian, Dan Pola Penyakit Yang Banyak Diderita

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu mencatat jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2009 sebanyak 302.302 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Namun karena keterbatasan data jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup menurut golongan umur ibu serta data jumlah kematian dalam setahun menurut golongan umur dan jenis kelamin, maka belum dapat memperbandingkan data usia harapan hidup, angka kelahiran, dan angka kematian penduduk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2009 dan tahun-tahun

sebelumnya. Data yang dapat dianalisa berdasarkan data jumlah akta yang dikeluarkan menurut jenis akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2007. Seperti terlihat pada tabel C.1, sepanjang tahun 2007 dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2007, jumlah angka kelahiran umum dan istimewa masing-masing adalah 101 dan 3.006 akta. Namun belum pernah dilaporkan jumlah angka kematian pada tahun tersebut. Sedangkan total jumlah perkawinan adalah 95 akta.

Tabel C.1. Jumlah Akta yang Dikeluarkan Menurut Jenis Akta

No.	Bulan	Kelahiran Umum	Kelahiran Istimewa	Kematian	Perkawinan
1.	Januari	4	17	-	-
2.	Pebruari	7	34	-	1
3.	Maret	7	61	-	1
4.	April	9	87	-	2
5.	Mei	19	218	-	73
6.	Juni	29	707	-	-
7.	Juli	7	1.735	-	3
8.	Agustus	8	128	-	1
9.	September	11	19	-	14
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	Nopember	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>3.006</b>	-	<b>95</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan data dari Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (Data sampai September 2007)

Tingginya angka kelahiran hidup di Kabupaten Tanah Bumbu, juga tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan di bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat mempengaruhi aspek pelayanan kesehatan yang dimaksud. Fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu adalah 1 (satu) buah RSUD Amanah Husada, 11 (sebelas) buah Puskesmas, 39 (tiga puluh sembilan) buah Puskesmas Pembantu dan 2 (dua) Balai Pengobatan yang ada di 10 (sepuluh) kecamatan yang dilengkapi juga dengan mobil Puskesmas Keliling. Selain sarana dan prasarana tersebut, pada setiap Puskesmas terdapat tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, meliputi dokter umum, dokter gigi dan tenaga penunjang kesehatan lainnya yakni perawat, bidan, dan dukun kampung / bayi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu seperti terlihat pada tabel C.2, jenis penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk adalah infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas, yakni sebanyak 10.365 kasus pada tahun 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 4.760 kasus. Secara keseluruhan pada tahun 2009, jumlah kasus penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2008. Penurunan jumlah penyakit yang diderita tersebut, didasari oleh berbagai faktor yaitu

semakin meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu, sosialisasi dan pembinaan oleh dinas/instansi terkait mengenai pentingnya menjaga kesehatan lingkungan sehingga sedikitnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih baik dari lingkungan sekitar maupun konsumsi makanan. Namun perlu juga diperhatikan pada lokasi-lokasi pemukiman di sekitar kegiatan industri, khususnya pertambangan, perkebunan dan kegiatan pelabuhan, perlunya pengawasan oleh Dinas/Instansi terkait mengenai dampak debu yang dihasilkan dari kegiatan tersebut serta limbah cair yang dibuang ke perairan umum agar tidak menimbulkan dampak negatif, mengingat sumber daya air seperti sungai, merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Tanah Bumbu. Jika semakin banyak sungai maupun laut yang tercemar akibat kegiatan pertambangan, perkebunan maupun pelsus, maka sumberdaya air tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Karena jika air sungai dimanfaatkan dalam kondisi tercemar dan tidak disadari oleh masyarakat maka akan menimbulkan dampak penyakit serius seperti penyakit kulit, diare dan lain-lain.

Tabel C.2. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita		% Terhadap Total Penderita	
		2008	2009	2008	2009
1.	Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas	10.365	4.760	32,01	22,55
2.	Tekanan darah tinggi	5.407	3.597	16,70	17,04
3.	Penyakit kulit alergi	3.088	2.348	9,54	11,12
4.	Penyakit lain pada saluran pernafasan atas	3.081	1.779	9,52	8,43
5.	Diare	2.567	2.217	7,93	10,50
6.	Penyakit pulpa dan jaringan periopital	2.428	1.431	7,50	6,78
7.	Penyakit pada system jaringan otot dan jaringan pengikat	1.829	1.962	5,65	9,29
8.	Kecelakaan dan ruda paksa	1.476	1.185	4,56	5,61
9.	Penyakit kulit infeksi	1.188	1.086	3,67	5,14
10.	Penyakit mata lainnya	949	747	2,93	3,54
<b>Total</b>		<b>32.378</b>	<b>21.112</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

## D. PERTANIAN

### D.1. Informasi Perubahan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang bercorak agraris. Karakteristik ini setidaknya dapat terlihat dari besarnya penggunaan lahan pertanian yang mencapai lebih dari 30 persen. Sekitar 43,08 persen penduduk Tanah Bumbu menggantungkan nasibnya di sektor tersebut. Namun seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan di sektor lain, terjadi transisi/perubahan fungsi lahan dari

pertanian menjadi lahan non pertanian. Data pada tahun 2009 (pada tabel D.1.), terlihat besarnya luasan perubahan lahan pertanian di berbagai sektor, dengan luasan lahan terbesar adalah lain-lain seperti pertambangan dan industri lainnya (395.035,5 Ha), perkebunan (111.461,5 Ha), Tanah kosong yang belum dimanfaatkan (17.875 Ha) dan pemukiman (17.679 Ha).

Tabel D.1. Luas Perubahan Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian

No.	Jenis Penggunaan Lahan Non Pertanian	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	17.679
2.	Industri	-
3.	Tanah kering	12.177
4.	Perkebunan	111.461,5
5.	Semak belukar	13.699
6.	Tanah kosong	17.875
7.	Perairan/kolam	12.827
8.	Lainnya	395.035,5
<b>Total</b>		<b>580.754</b>

Keterangan : Data pada 10 (sepuluh) Kecamatan

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu

Total luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2009 adalah seluas 31.046 Ha. Kondisi pertanian Kabupaten Tanah Bumbu secara umum tidak jauh berbeda dengan karakter pertanian di kabupaten di sekitarnya. Komoditi Tanaman Padi dan palawija merupakan subsektor tanaman pangan yang penopang ketahanan pangan Kabupaten Tanah Bumbu. Produksi padi (sawah dan ladang) kabupaten ini tahun 2007-2008 sebesar 75.420 ton sedangkan pada tahun 2008-2009 sedikit mengalami penurunan produksi, yaitu sebesar 73.694 ton (sebagian besarnya adalah padi sawah). Kecamatan Kusan Hilir sebagai produsen padi terbesar menghasilkan 25.459 ton padi pada tahun 2007 – 2008 dan 24.938 ton pada tahun 2008 – 2009. Pada produksi palawija Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007-2008 terbesar dihasilkan dari produksi Jagung yang mencapai 1.081 ton dan meningkat pada tahun 2008 – 2009 menjadi 3.280 ton. Kecamatan Kusan Hulu, Mantewe dan Sungai Loban cukup mendominasi dalam produksi palawija dibandingkan dengan 7 (tujuh) kecamatan lainnya.

## **D.2. Informasi Penggunaan Pupuk Untuk Lahan Sawah, Lahan Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan**

Luasnya lahan pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu juga mempengaruhi besarnya kebutuhan petani dalam penggunaan pupuk. Berikut disajikan dalam bentuk tabel D.2. dan D.3. penggunaan pupuk untuk tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija berdasarkan jenis pupuknya.

Tabel D.2. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Perkebunan menurut Jenis Pupuk

No.	Jenis Tanaman	Pemakaian Pupuk (Ton)				
		Urea	SP.36	ZA	NPK	Organik
1.	Karet	3.119	1.559,5	-	5.459,6	-
2.	Kelapa	652,2	312,6	-	1.694	-
3.	Kelapa sawit	9.741,8	4.870,9	-	17.048,1	-
4.	Kopi	46	23,2	-	81,2	-
5.	Coklat	21,6	10,8	-	37,80	-
6.	Teh	-	-	-	-	-
7.	Cengkeh	240	1,20	-	4,20	-
8.	Tebu	300	15	-	52,50	-
9.	Tembakau	-	-	-	-	-
10.	Kapas	-	-	-	-	-
11.	Jarak	28,80	14,40	-	50,40	-
12.	Kapuk	-	-	-	-	-
13.	Kina	-	-	-	-	-
14.	Jambu mete	-	-	-	-	-
15.	Pala	-	-	-	-	-
16.	Kayu manis	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>14.149,4</b>	<b>6.807,7</b>	<b>-</b>	<b>24.427,8</b>	<b>-</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel D.3. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Pupuk

No.	Jenis Tanaman	Pemakaian Pupuk (Ton)					
		KCI	TSP	Urea	ZA	NPK	Organik
1.	Padi Sawah MT	1.380.975	1.841.300	2.258.850	-	-	-
2.	Padi Gogo MT	399.750	533.000	799.500	-	-	-
3.	Jagung MT	194.625	259.560	389.250	-	-	-
4.	Kedelai MT	228.525	304.700	457.050	-	-	-
5.	Kacang Hijau MT	27.300	36.400	54.600	-	-	-
6.	Kacang tanah	-	-	-	-	-	-
7.	Ubi kayu	-	-	-	-	-	-
8.	Ubi jalar	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>2.231.175</b>	<b>2.974.960</b>	<b>3.959.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Keterangan : Data pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu, Batulicin, Sei. Loban dan Satui

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tabel D.2, terlihat jumlah pupuk terbanyak yang digunakan pada tanaman perkebunan adalah pupuk NPK (24.427,8 ton). Sedangkan pada tanaman padi dan palawija, jumlah pupuk terbanyak yang digunakan oleh petani adalah jenis pupuk Urea (3.959,250 ton). Dari data yang ada tidak didapatkan besarnya penggunaan pupuk organik di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2009.

Berdasarkan data yang ada, pada tabel D.2 dan D.3, menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan pupuk anorganik/kimia seperti pupuk urea, NPK, TSP, KCI dan masih banyak jenis lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas tanaman. Meskipun pada kenyataannya

penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah. Pada dasarnya, penggunaan pupuk kimia bertujuan untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil pertanian, namun jika penggunaannya berlebihan maka akan berdampak buruk pada tanah yaitu musnahnya berbagai organisme penyubur tanah, kesuburan tanah merosot, keseimbangan ekosistem tanah rusak dan terjadinya peledakan serta meningkatnya jumlah serangan hama. Karena itu pada masa yang akan datang, perlu adanya penyuluhan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas/instansi terkait kepada masyarakat khususnya petani untuk mulai mengurangi pemakaian pupuk anorganik/kimia dan lebih banyak menggunakan pupuk organik untuk kegiatan pertanian. Karena pada dasarnya penggunaan pupuk organik selain dapat meningkatkan produktifitas tanaman juga dapat memperbaiki struktur tanah dan mendorong perkembangan mikroorganisme tanah.

## E. INDUSTRI

### E.1. Informasi Jumlah Industri Yang Berpotensi Mencemari Sumber Air Dan Udara, Tingkat Ketaatan Terhadap Baku Mutu

Pembangunan sektor industri pada umumnya di tujuakan untuk mendorong percepatan laju perekonomian daerah, hal ini disebabkan oleh sifatnya yang berhubungan langsung dan berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat setempat. Sebagai daerah yang relatif muda, saat ini Kabupaten Tanah Bumbu terus berusaha mendorong sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai salah satu andalan dalam menopang roda perekonomiannya. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk pembinaan pengrajin/pengusaha industri kecil dan menengah, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas hasil produksi serta peningkatan pelayanan informasi dan perjinan disektor industri. Pengembangan sektor industri kecil dan menengah dipercaya banyak kalangan sebagai langkah awal yang tepat untuk mempercepat laju perekonomian, khususnya pada situasi baru yaitu pemberlakuan otonomi daerah, pengembangan kawasan andalan dan pasar global. Berikut data jumlah industri yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan skala usahanya :

Tabel E.1. Jumlah Industri/Kegiatan Usaha Skala Menengah dan Besar

No.	Nama Industri	Jenis Industri*)	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi (000,-)
1.	Industri Kapal	Pembuatan Kapal	23 Buah	613.000
2.	Industri Bengkel Mobil dan Sepeda Motor	Bengkel Mobil dan Sepeda Motor	10.330 Unit	822.000
3.	Industri Las	Pengelasan	4.625 Unit	1.089.000
4.	Industri Meubel	Pembuatan Meubel	3.665 Buah	1.462.000
5.	Industri Tenun	Pembuatan Kain Tenun	920 Lembar	755.000
6.	Industri Air Minum	Pengolahan Air Minum	87.000 Liter	450.000
7.	Industri Penggilingan Padi	Penggilingan Padi	584 Ton	398.500
8.	Industri Batubara	Batubara	5.300.000 Ton	-
9.	Industri Batako	Pembuatan Batako	16.000 Buah	150.000

10.	Industri Es	Pembuatan Es Balok	12.600 Balok	150.000
11.	Industri Tahu/Tempe	Pembuatan Tahu dan Tempe	17.300 Kg	618.000

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tanah Bumbu

Tabel E.2. Jumlah Industri/Kegiatan Usaha Skala Kecil

No.	Nama Industri	Jenis Industri*)	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi (000,-)
1.	Industri Krupuk	Pembuatan krupuk	4.750 Kg	51.500
2.	Industri Gula	Pembuatan Gula	800 Kg	1.200
3.	Industri Kue/Roti	Pembuatan Kue/Roti	3.700 Kg	45.500
4.	Industri Anyaman	Pembuatan Anyaman	1.500 Lbr	23.000
5.	Industri Pengeringan Ikan	Pengeringan Ikan	7.000 Kg	103.000
6.	Industri Gerabah	Pembuatan Gerabah	1.700 Buah	24.000
7.	Industri Ukiran	Pembuatan Ukiran	200 Buah	7.000
8.	Industri Minyak	Minyak	500 Liter	2.000
9.	Industri Sirap	Pembuatan Sirap	1.300 Pak	30.000

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tanah Bumbu

Dari sekitar 11 (sebelas) jumlah industri skala menengah/besar dan 9 (sembilan) jumlah industri skala kecil, selain memiliki dampak positif peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya pencemaran sumber air, tanah dan udara. Rata-rata lokasi industri kecil berada di sekitar pemukiman penduduk. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pelaku industri kecil akan pentingnya pengelolaan lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu contohnya adalah pembuangan limbah industri bengkel mobil dan sepeda motor. Meskipun sebagian besar limbah dari kegiatan tersebut seperti oli bekas dan pelumas dijual ke pengumpul namun tetap saja ada sebagian ceceran oli, pelumas dan sisa buangan lainnya terbuang ke selokan-selokan sekitar. Limbah berupa oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang secara sembarangan sangat berbahaya bagi lingkungan. Sebab oli bekas dapat menyebabkan tanah kurus dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Begitu juga dengan adanya industri pembuatan kapal yang kebanyakan lokasinya di pinggir sungai. Limbah sisa kayu hasil kegiatan sebagian ada yang dimanfaatkan kembali, namun ada juga sebagian yang dibuang begitu saja sehingga pada saat air sungai pasang, sisa kayu industri larut ke sungai. Hal ini jelas memperparah kondisi sungai yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan dari industri besar, kegiatan yang paling banyak menyebabkan perubahan lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Dari banyaknya kegiatan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, hanya sebagian kecil yang melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan SOP. Padahal dalam kenyataannya, dampak kerusakan lingkungan terbesar yang ada saat ini dihasilkan berasal dari kegiatan pertambangan, baik ditinjau

dari pencemaran air sungai di sekitar lokasi kegiatan, juga pencemaran udara yaitu meningkatnya kadar debu dan kebisingan yang berasal dari operasional tambang dan angkutan tambang di sekitar lokasi maupun yang melintasi pemukiman penduduk. Banyaknya kegiatan industri baik itu industri kecil, menengah dan industri besar yang tidak mengelola limbahnya sesuai dengan ketentuan mengakibatkan tingkat tekanan lingkungan semakin tinggi. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada para pelaku industri kecil, menengah maupun industri besar untuk melakukan kegiatannya yang diimbangi dengan adanya pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan limbah industri. Mengingat limbah yang dihasilkan sebagian besar juga adalah limbah B3 yang sangat berbahaya jika mencemari lingkungan sekitar. Langkah lain yang perlu dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait adalah melakukan pendataan terhadap industri kecil, menengah maupun besar yang berpotensi mencemari lingkungan dari limbah B3 yang dihasilkan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbahnya dan melakukan upaya penertiban jika menemukan industri yang terindikasi tidak melakukan pencemaran lingkungan.

## F. PERTAMBANGAN

### F.1. Informasi Produksi Dan Luas Areal Konsesi Pertambangan Yang Perizinan Dan Atau Pengawasannya Merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota

Bagi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu, sektor pertambangan terutama pertambangan batubara merupakan salah satu sektor yang sangat berperan. Lokasi pertambangan tersebar sebagian besar di Kecamatan Satui dan Simpang Empat. Sebagian kecilnya lagi di kecamatan Mantewe, Sungai Loban, Angsana, Kusan Hulu dan Karang Bintang. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2009 ada 78 perusahaan/KUD yang mendapatkan izin pertambangan batu bara dan selama kurun waktu tersebut dan dihasilkan produksi batu bara sebanyak 54.128.881,4 ton/tahun. Selain batu bara terdapat pula pertambangan bijih besi yang dieksploitasi oleh perusahaan PT. Yiwon Mining yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat. Produksi bijih besi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sebesar 52.237,125 ton/tahun. Data lengkap mengenai jumlah perusahaan pertambangan dan produksinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel F.1. Produksi Pertambangan menurut Jenis Bahan Galian

No.	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Galian	Produksi (Ton/Tahun)
1.	CV. Bara Pinang Cooperation	Batubara	-
2.	CV. Baramega Berkah Utama	Batubara	89.228,145
3.	CV. Bina Silba	Batubara	-
4.	CV. Erlianti	Batubara	34.924,061
5.	CV. Indoku Amiah Coal	Batubara	-
6.	CV. Karya Sungai Danau Mandiri	Batubara	16.656,934
7.	CV. Putra Parahyangan Mandiri	Batubara	191.828,429
8.	CV. Rahma Rahman	Batubara	202.210,098
9.	CV. Risna Karya Whardana	Batubara	25.707,534
10.	PT. Rizqi Utama Indobara	Batubara	163.859,733
11.	KUD. Nusantara	Batubara	234.726,114
12.	KUD. Surya Muda	Batubara	18.483,720

13.	PT. Bumi Dharma Kencana	Batubara	33.605,028
14.	PT. Kamikawa Gawi Sabumi	Batubara	76.481,162
15.	PT. Karya Wijaya Utama	Batubara	-
16.	PT. Mitra Jaya Abadi Bersama	Batubara	447.407,174
17.	PT. Satui Baratama	Batubara	-
18.	PT. Tantra Mining Development	Batubara	-
19.	PT. Berkat Hanjuang Jaya	Batubara	3.758,356
20.	PT. Erlianti Permata Top Indonesia	Batubara	46.858,983
21.	PT. MMIR Multi Sarana Mandiri	Batubara	4.776,882
22.	PT. Dayaindo Resources International	Batubara	55.425,386
23.	PT. Era Dasa Indonesia	Batubara	41.047,888
24.	PT. Prestasi Karsa Mandiri	Batubara	-
25.	CV. Purnawira Brata Sakti	Batubara	55.664,304
26.	CV. Aulia	Batubara	-
27.	PT. Tapin Sarana Jaya	Batubara	45.328,943
28.	PT. Mustika Cynthia Mandiri	Batubara	117.182,679
29.	CV. Anugerah Borneo Coal	Batubara	107.991,958
30.	CV. Bintang Mulia Bara	Batubara	69.239,899
31.	PT. Autum Beringin Energi	Batubara	363.676,928
32.	CV. Hidayatul Mukarramah	Batubara	48.542,763
33.	PT. Berkat Indonesia Mandiri	Batubara	13.941,884
34.	PT. Central Mining	Batubara	48.662,892
35.	PT. Group Pijar	Batubara	104.309,366
36.	KUD. Bina Warga Sejahtera	Batubara	210
37.	PT. Anzawara Satria	Batubara	23.502,952
38.	PT. Berkat Bersujud	Batubara	7.774,487
39.	PT. Kalimantan Energi utama	Batubara	30.876,815
40.	PT. Natriva Surya Perkasa	Batubara	5.659,037
41.	PT. Citra Nusa Jaya	Batubara	13.616,451
42.	CV. Sarana Usaha	Batubara	2.379,317
43.	CV. Bara Bintang	Batubara	12.705,108
44.	CV. Sarana Usaha	Batubara	19.363,558
45.	CV. Sinar Lutung	Batubara	166.858,866
46.	CV. Bina Usaha	Batubara	103.328,954
47.	KUD. Sido Makmur	Batubara	11.991,572
48.	KUD. Tirta Utama	Batubara	-
49.	PT. Deli Pratama Coal	Batubara	-
50.	PT. Eka Satya Pratama	Batubara	90.707,524
51.	PT. Purnama Surya Citra	Batubara	141.482,289
52.	PT. Putra Batulicin Membangun	Batubara	93.312,513
53.	PT. Radhitya Bara Moya	Batubara	1.223,673
54.	PT. Saraburi Prima Coal	Batubara	47.870,253
55.	PT. Publik Opsi Mandiri	Batubara	31.967,093
56.	CV. Siti Maju Sejahtera	Batubara	170.764,581
57.	PT. Lianggang Cemerlang	Batubara	215.334,737
58.	PT. Berkat Banua Inti	Batubara	426.530,056
59.	CV. Putri Tunggal	Batubara	67.993,319
60.	CV. Multi Mineral Sejahtera	Batubara	100.228,902
61.	CV. Anugerah Sukses Gemilang	Batubara	569.606,183
62.	PT. Mega Intan Budi Utama	Batubara	11.558,265
63.	CV. Antariksa	Batubara	-
64.	CV. Madona	Batubara	-
65.	PT. Amanat Baru	Batubara	145.875,572
66.	APTBT (Asosiasi)	Batubara	2.430
67.	CV. Anugerah Fitria	Batubara	41.578,218
68.	CV. Bintang Timur Raya	Batubara	93.617,894
69.	PT. Multiarta Indah Raya	Batubara	57.388,110
70.	PT. Astri Prima	Batubara	47.755,198
71.	KUD. Karya Meratus	Batubara	34.409,034
72.	PT. Sinar Cahaya Batu	Batubara	28.857,754
73.	PT. Anugerah Bara Selaras	Batubara	8.046,523
74.	Kelompok Unit Usaha Masyarakat	Batubara	400
75.	PT. Praharna Muda Pratama	Batubara	14.039,052
76.	CV. Zuhriyah Bersinar	Batubara	3.883,488
77.	PT. Erlianti Permata Top Indonesia	Batubara	7.997,702
78.	PT. Yiwon Mining	Bijih Besi	52.237,125

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

Dari data Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru yang berdasarkan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan No : SK.453/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999, luas konversi hutan untuk areal pertambangan adalah 271.461 Ha dari total luas hutan 589.050 Ha yang berarti luas lahan yang dibuka untuk pertambangan batubara adalah  $\pm$  46 % dari total luas hutan yang ada. Pengubahan fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan atau tukar-menukar kawasan, dalam hal ini adalah pertambangan akan menyebabkan kerusakan hutan dan lahan. Dari kondisi tersebut jelas terlihat bahwa pembukaan areal untuk pertambangan batubara yang juga merambah ke wilayah kawasan hutan sangat mengganggu fungsi hutan lindung itu sendiri sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, pengendali erosi, pencegah intrusi air laut dan pemelihara kesuburan tanah, sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya banjir pada saat intensitas hujan tinggi dan kekeringan atau kebakaran pada saat kemarau panjang. Selain terjadinya perubahan lingkungan dari kondisi awalnya, minimnya jumlah perusahaan yang melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan, memperparah laju kerusakan lingkungan. Data pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang telah dilakukan selama tahun 2009 oleh Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu, menunjukkan hanya sedikit perusahaan yang memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan, selebihnya belum melengkapi seperti yang dipersyaratkan, baik itu dari kelengkapan administrasi maupun fisik pengelolannya, seperti pengelolaan kualitas air (ada tidaknya unit *settling pond/sediment pond/tailing pond*/kolam pengendapan untuk pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke perairan umum), pengelolaan limbah B3 (adanya *oil trap* dll), pengelolaan kualitas udara yang meliputi kadar debu dan kebisingan serta reklamasi/revegetasi. Pada intinya setiap perusahaan harus melaksanakan pertambangan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar dan kaidah pertambangan yang ramah lingkungan. Tabel pengawasan UKL/UPL beberapa kegiatan perusahaan pertambangan yang dilaksanakan oleh Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel F.2. Pengawasan UKL/UPL

No.	Waktu (tgl/bln/thn)	Nama Perusahaan /Pemrakarsa	Hasil Pengawasan
			UKL-UPL
1.	08/01/2009	PT. Putra Batulicin Membangun	a. Kualitas air : Belum ada perlakuan pada <i>settling pond</i> Belum memiliki izin pembuangan limbah cair b. Kualitas udara : Belum melakukan uji kualitas udara c. Belum ada pengelolaan limbah B3
4.	16/01/2009	KUD Nusantara Tambang Batubara	- <i>Settling Pond</i> belum sesuai dokumen - Workshop berpindah-pindah - Limbah B3 dijual ke pengepul
5.	19/01/2009	PT. Bintang Mulia Bara	- Kegiatan penambangan berdekatan dengan lokasi

			SDN Banjarsari 2 tetapi tidak terjadi longsor – Telah dibuat pagar pengaman di sisi utara SDN Banjarsari 2
8.	03/02/2009	KUD Tirta Utama	Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL
9.	10/02/2009	PT. Lianggang Cemerlang	– Belum melakukan pengukuran kualitas air secara periodic – Belum ada SK UKL-UPL Bupati Tanah Bumbu untuk kegiatan pertambangan di lokasi tersebut – Hanya memiliki ijin untuk kegiatan pelsus
10.	18/02/2009	PT. Terminalindo Idaman Permai	– Belum memiliki ijin HO – Settling pond belum sesuai dengan standard
11.	24/03/2009	PT. Eka Persada Utama	Belum memiliki ijin pembuangan limbah cair
12.	25/04/2009	CV. Bina Usaha	Belum memiliki ijin pembuangan limbah cair
13.	28/04/2009	CV. Siti Maju Sejahtera	Belum ada akses jalan menuju settling pond
14.	30/04/2009	PT. Putra Batulicin Membangun	Keadaan settling pond belum sesuai dengan standard
15.	27/05/2009	PT. Purnama Surya Cipta	– Settlingpond di luar wilayah konsesi – Belum ada izin pembuangan limbah cair
16.	03/06/2009	PT. Lianggang Cemerlang (Washing Plant)	– Belum ada laporan triwulan – Belum ada izin pembuangan limbah cair
17.	11/06/2009	PT. Eka Satya Pratama	Belum memiliki izin pembuangan air limbah (titik penataan)
18.	17/06/2009	PT. Rizki Utama Indobara (Pelsus)	– Belum ada workshop – Belum memiliki AMDAL dan izin pembuangan limbah cair
21.	24/07/2009	PT. Buana Karya Wiranata	Belum melakukan uji kualitas air
22.	19/08/2009	PT. Bara Mega Berkah Utama	– Belum menyampaikan laporan triwulan – Tutupan OB akan dilakukan pembongkaran kembali
23.	26/08/2009	PT. Autum Beringin Energi	Belum menyampaikan laporan triwulan
24.	26/08/2009	PT. Natriva Surya Perkasa	– Belum memiliki settling pond – Kegiatan tambang berhenti sementara
25.	08/09/2009	KUD. Hatiif Bara Makmur	– Belum menyampaikan laporan triwulan – Kegiatan tambang berhenti sementara

Keterangan : Data diperoleh dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Instansi Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu selaku bidang teknis yang menangani pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu

Untuk mengantisipasi dan menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi di sektor pertambangan, Pemerintah Kabupaten perlu mengkaji setiap kebijakan yang dibuat agar lebih memperhatikan aspek lingkungan, sehingga tidak semakin meningkatkan laju penurunan kualitas lingkungan yang akhirnya akan merugikan masyarakat. Setiap kegiatan ijin eksploitasi bahan tambang khususnya batubara skala besar dipersyaratkan membuat dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan

meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan seperti yang tertera pada dokumen AMDAL maupun UKL/UPL, selain itu untuk meningkatkan ketaatan dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL dan UPL secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk pengendalian dampak lingkungan oleh aktifitas pertambangan skala kecil/pertambangan rakyat melalui upaya penertiban dan instruksi teknologi pengelolaan lingkungan kepada pelaku kegiatan tambang, juga diperlukan upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat ditempuh melalui pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya setempat dan ditunjang pula oleh manajemen kependudukan untuk mengendalikan migrasi musiman pelaku kegiatan tambang skala kecil.



Gambar 9. Kondisi Perubahan Lingkungan Pada Areal Pertambangan PT. Autum Bara Energi

## **G. TRANSPORTASI**

### **G.1. Informasi Sarana dan Prasarana Transportasi Kabupaten Tanah Bumbu**

Prasarana perhubungan darat yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu berupa jalan darat sepanjang 1.583.090 km yang terdiri dari 157.600 km jalan negara, 118.800 km jalan provinsi dan 1.306.690 km jalan kabupaten. Keadaan tahun 2007-2008, dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Tanah Bumbu, 98.825 km berkondisi baik, 77.795 km berkondisi sedang, 936.40 km berkondisi rusak dan 313.01 km berkondisi rusak berat. Jalan dengan kondisi rusak berat terpanjang adalah di jalan kabupaten sepanjang 250.56 km. Jika dipersentasekan maka jalan rusak dan rusak yang melintasi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 87,61%. Namun pada tahun 2008-2009 kondisi jalan propinsi yang melintasi Kabupaten Tanah Bumbu sudah lebih dari 90% beraspal. Kondisi jalan yang demikian semakin memperlancar arus lalu lintas dan diharapkan kedepannya kondisi ini semakin memperlancar aktifitas perekonomian.

Disamping prasarana angkutan jalan darat ketersediaan prasarana laut dan sungai juga memegang peranan penting. Hal ini ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Samudra di Batulicin, Pelabuhan Lokal di Pagatan, dan Pelabuhan di Satui yang merupakan pintu gerbang masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu melalui laut. Untuk mendukung aktifitas perekonomian yang semakin tinggi, maka saat ini Kabupaten Tanah Bumbu telah melengkapi diri dengan prasarana angkutan udara yang cukup memadai dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

## **H. PARIWISATA**

### **H.1. Informasi Lokasi-Lokasi Wisata Dan Jumlah Pengunjung Serta Jumlah Hotel / Penginapan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang sedang tumbuh dan berkembang, khususnya dalam memacu penerimaan devisa Negara dan pendapatan asli daerah. Peluang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat terbuka lebar dan dapat dijadikan sebagai salah satu unggulan. Keunggulan tersebut antara lain sebagai daerah tujuan wisata dengan beberapa obyek berupa wisata bahari (Terumbu Karang), wisata alam, wisata panorama, dan wisata budaya. Selain itu karena posisinya yang strategis, kabupaten Tanah Bumbu dapat berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata regional khususnya di Propinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional serta terbukanya jalur transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah Kalimantan Selatan, perkembangan obyek wisata di daerah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu diprediksikan akan dapat berkembang dengan pesat. Peluang investasi di sektor pariwisata diarahkan untuk pengembangan infrastruktur di area wisata pesisir kabupaten Tanah Bumbu terutama infrastruktur transportasi. Peluang pengembangan investasi lainnya berupa penyediaan fasilitas akomodasi seperti hotel dan guest house, biro perjalanan wisata, dan toko cinderamata. Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai Pantai yang cukup panjang sekitar 200 km, dengan panorama yang indah. Jumlah keseluruhan obyek wisata di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 36 obyek wisata, meliputi 21 obyek wisata alam, 5 obyek wisata buatan dan 10 obyek wisata religius dan budaya. Ada tiga lokasi obyek wisata alam yang selama ini menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun pendatang Pantai Rindu Alam, Pulau Salak, Pantai Pagatan dan Goa Sugung yang terjadi dari proses alam terletak di km 44, jalan Kadeco Kecamatan Mentewe dengan luas sekitar 12 ha. Beberapa lokasi wisata tersebut selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya pada saat hari libur.

Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ini berimbas pada peningkatan jumlah/volume limbah padat di lokasi obyek wisata. Kondisi ini diperparah dengan tidak tersedianya tempat sampah ataupun fasilitas kebersihan lainnya seperti adanya papan-

papan himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi oleh Dinas/Instansi terkait kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian obyek wisata, baik itu langsung ke masyarakat maupun melalui kecamatan ataupun ke desa. Banyaknya limbah padat di sekitar lokasi obyek wisata khususnya obyek wisata pantai selain berasal dari pengunjung juga berasal dari limbah rumah tangga masyarakat pesisir pantai. Dari data yang ada jumlah kependudukan di laut dan pesisir tahun 2008 adalah 38.402 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 82.230 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar pesisir pantai ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah limbah/buangan rumah tangga. Rata-rata kesadaran penduduk tersebut untuk membuang sampah rumah tangga di tempat yang seharusnya masih sangat kurang. Terlihat di sekitar pantai sampah berserakan dan ada sebagian yang dibuang begitu saja ke laut. Melihat kondisi seperti ini, perlu adanya program-program atau kegiatan oleh Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan perlunya menjaga kelestarian lingkungan serta melibatkan peran serta masyarakat/penduduk sekitar. Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan di sekitar lokasi obyek wisata juga perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait seperti adanya tempat-tempat sampah dan petugas khusus untuk membersihkan lokasi obyek wisata. Beban pencemaran lingkungan dari sektor pariwisata selain berasal dari aktifitas di lokasi obyek wisata, juga berasal dari kegiatan hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada table I.1. terlihat ada 44 sarana hotel/penginapan. Namun rata-rata pengelola hotel/penginapan sudah mempunyai petugas khusus kebersihan yang menangani masalah limbah padat/sampah. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan hotel/penginapan setiap hari dikumpulkan di tempat pembuangan sampah dan ada petugas kebersihan yang selanjutnya mengangkut ke TPS terdekat. Sampai saat ini juga belum pernah dilakukan pendataan jumlah volume limbah padat harian ataupun bulanan pada lokasi obyek wisata dan hotel/penginapan oleh Dinas/Instansi terkait, sehingga sulit diketahui besarnya tekanan lingkungan khususnya di sekitar lokasi-lokasi tersebut.



Gambar 10. Kondisi Obyek Wisata Alam Pantai di Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel I.1. Sarana Hotel/Penginapan, Jumlah Kamar, dan Tingkat Hunian

No.	Nama Hotel/Penginapan	Kelas	Jumlah Kamar				
			Press	Junior	Deluxe	VIP	Stand
1.	Hotel Friendship	Bintang	-	-	24	10	8
2.	Hotel Surya	Bintang	-	6	12	-	6
3.	Hotel Grand Central	Bintang	1	1	13	2	11
4.	Hotel Ebony	Bintang	1	2	23	-	30
5.	Hotel Nugraha Batulicin	Bintang	-	24	2	1	-
6.	Hotel Satui Adi Nugraha	Bintang	-	-	8	10	10
7.	Hotel Putri Duyung	Bintang	-	-	3	27	6
8.	Hotel Grand Fortune	Melati	-	-	-	-	-
9.	Hotel Anugerah Baru	Melati	17	1	10	10	1
10.	Hotel Semarang	Melati	-	-	19	5	10
11.	Hotel Chandra Asri	Melati	-	10	5	4	10
12.	Hotel Dewi Vip Room	Melati	-	-	1	13	-
13.	Hotel Mutiara	Melati	-	-	-	9	3
14.	Hotel Mega Indah	Melati	-	-	-	15	11
15.	Hotel Setia Kawan	Melati	-	-	-	-	25
16.	Hotel Duta Arjuna	Melati	-	-	-	-	15
17.	Hotel Subur Buana	Melati	-	-	-	-	25
18.	Hotel Hidayah	Melati	-	-	-	13	4
19.	Hotel Dewi Fortune	Melati	-	-	-	17	12
20.	Hotel Dewi	Melati	-	-	-	25	13
21.	Hotel Trully	Melati	-	-	-	-	-
22.	Hotel Rakhmat I	Melati	-	-	-	-	31
23.	Hotel Rakhmat II	Melati	-	-	-	-	9
24.	Hotel Lestari I	Melati	-	6	4	10	5
25.	Hotel Wahana Murni	Melati	-	-	-	3	3
26.	Penginapan Sederhana	Penginapan	-	-	-	-	44
27.	Wisma Sinar Samudera	Penginapan	-	-	1	3	6
28.	Wisma Tirta Asri	Penginapan	-	-	-	-	-
29.	Penginapan Mega Wati	Penginapan	-	-	-	-	10
30.	Penginapan Sudi Agung	Penginapan	-	-	-	-	9
31.	Penginapan Sari Indah	Penginapan	-	-	-	11	-
32.	Penginapan Selera	Penginapan	-	-	-	-	13
33.	Penginapan Sudan indah	Penginapan	-	-	-	4	5
34.	Penginapan Sabili	Penginapan	-	-	-	4	10
35.	Penginapan Nor Hikmah	Penginapan	-	-	-	-	10
36.	Penginapan Sederhana	Penginapan	-	-	-	9	4
37.	Penginapan Karya Mas	Penginapan	-	-	-	3	11
38.	Penginapan Abadi	Penginapan	-	-	-	-	10
39.	Pondok Agita	Penginapan	-	-	-	2	10
40.	Wisma Shangrilla	Penginapan	-	-	-	-	-
41.	Penginapan Warga	Penginapan	-	-	-	-	18
42.	Penginapan Batuah	Penginapan	-	-	-	-	5
43.	Penginapan Pada Idi	Penginapan	-	-	-	2	2
44.	Losmen Yenny	Losmen	-	-	-	-	-

Keterangan : Data tingkat hunian dari sarana hotel/penginapan tidak tersedia pada dinas/instansi terkait  
 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

## I. LIMBAH B3

### I.1. Informasi perusahaan penghasil limbah B3 serta perusahaan yang mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan, mengangkut, dan memusnahkan limbah B3

Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat berbagai jenis kegiatan/usaha yang digali dari potensi alam yaitu sektor pertambangan. Jenis kegiatan/usaha dari sektor tersebut selain bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, yang berasal dari limbah kegiatan operasional perusahaan, salah satunya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun atau lazim disebut dengan limbah B3. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Dari data yang ada pada tahun 2009, di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat ± 31 perusahaan pertambangan batubara yang juga sekaligus merupakan perusahaan penghasil limbah B3, dimana limbah B3 yang dihasilkan berasal dari sisa operasional kegiatan.

Tabel J.1. Perusahaan Penghasil Limbah B3 dan Jenis Limbah

No.	Nama Industri	Jenis Kegiatan	Jenis Limbah
1.	PT. Arutmin Indonesia Site Satui Tambang Satui dan Tambang Mulia	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
2.	PT. Tantra Mining	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
3.	PT. Yiwon Mining	Tambang Bijih Besi	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
4.	PT. Lianggang Cemerlang	Tambang Batubara, Pelsus dan Washing Plant	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
5.	PT. UBCI	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
6.	KUD. Nusantara	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
7.	PT. Usaha Kawan Sejati	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
8.	PT. Citra Nusa Jaya	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
9.	PT. Publik Opsi Mandiri	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan

10.	PT. Satui		Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
11.	PT. Satui Baratama Site Satui	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
12.	PT. Satui Baratama Site Simpang Empat	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
13.	PT. Bina Usaha	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
14.	PT. Bina Usaha	Tambang Bijih Besi	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
15.	PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
16.	PT. Kodeco Timber	Pelsus Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
17.	PT. Radhitya Baramoya	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
18.	PT. Eka Satya Pratama I	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
19.	PT. Eka Satya Pratama II	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
20.	PT. Arutmin Indonesia Site Batulicin	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan (Oli bekas dan Grease bekas masing-masing sebanyak 1 drum)
21.	PT. Bintang Mulia Bara	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
22.	PT. Amanat Baru	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
23.	PT. Sarana Artha Jaya	Stockpile & Pelsus Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
24.	PT. Berkat Borneo Coal	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
25.	PT. Berkat Banua Indah	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
26.	PT. Bintang Timur Raya	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
27.	PT. Wahana Baratama Mining	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
28.	CV. Rahma Rahman	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
29.	PT. Putra Batulicin Membangun	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
30.	PT. Rizqi Utama Indobara	Tambang Batubara dan Pelsus	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan
31.	PT. Dua Samudera Perkasa	Tambang Batubara	Limbah B3 dari sisa operasional kegiatan

Keterangan : Berdasarkan laporan triwulan yang disampaikan oleh pihak perusahaan ke Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu  
Sumber : Bapedalda Tanah Bumbu

Tak dapat dipungkiri semakin banyaknya kegiatan industri pertambangan, perkebunan, pelsus serta industri lainnya berimbas pada meningkatnya produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Umumnya limbah B3 tersebut berasal dari operasional perusahaan, seperti alat-alat berat dan bengkel. Namun sejauh ini, hanya

sebagian kecil perusahaan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan, diantaranya adalah PT. Arutmin Indonesia site Satui dan Batulicin serta PT. Wahana Baratama Mining. Ketiga perusahaan tersebut telah memiliki Izin untuk Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Pemusnahan (Land Fill) dan Pengangkutan Limbah B3, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel J.2. Perusahaan yang Mendapat Izin untuk Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pemusnahan (Land Fill) Limbah B3 dan Perusahaan Perusahaan yang Mendapat Rekomendasi dan Izin dari Perhubungan untuk Pengangkutan Limbah B3

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin/Jenis Izin
1.	PT. Arutmin Indonesia Site Satui	Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Tambang Satui dan Tambang Mulia
2.	PT. Arutmin Indonesia Site Batulicin	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 522 Tahun 2007 Tentang izin Penyimpanan Limbah Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin
3.	PT. Wahana Baratama Mining	KepMen.LH No. 799 Tahun 2009 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT. Wahana Baratama Mining
4.	PT. Karunia 68 (KM Farhan Jaya)	552.2/012.a/550/I/2009 Tanggal 06 Jan 2009 (Izin dari perhubungan untuk pengangkutan limbah B3)
5.	PT. Cahaya Ujung Belingkar (KM Cahaya Simpang)	552.2/757/550/V/2009 Tanggal 20 Mei 2009 (Izin dari perhubungan untuk pengangkutan limbah B3)
6.	Misyani Binti Pena (KLM. Setia Pelamar)	552.2/996/550/VII/2009 Tanggal 09 Juli 2009 (Izin dari perhubungan untuk pengangkutan limbah B3)
7.	H. Samsuddin (KM. Budiman)	552.2/1017/550/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009 (Izin dari perhubungan untuk pengangkutan limbah B3)
8.	PT. Cahaya Ujung Belingkar (KM. Cahaya Pelita)	552.2/1062.a/550?VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 (Izin dari perhubungan untuk pengangkutan limbah B3)

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Bumbu

Beberapa jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industri secara umum adalah minyak pelumas/oli bekas, baterai bekas dan aki. Pada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki ijin resmi, limbah B3 yang dihasilkan dan dikeluarkan dari tambang sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengangkutan oli bekas dilakukan secara regular oleh pengumpul dan penetralisasi limbah resmi yang selanjutnya didaur ulang. Sedangkan limbah klinik yang ada di base camp tambang dikumpulkan dan dikirim untuk dilakukan insenerasi di Jakarta.

Namun terkadang pada kegiatan industri lainnya, limbah B3 dibuang begitu saja ke perairan/lahan terbuka. Ada juga yang ditimbun/ditampung dalam kontainer yang mudah rusak sehingga menyebabkan limbah B3 masuk ke tanah atau terbawa oleh aliran air hujan ke sistem air permukaan dan air bawah tanah.

Sementara limbah yang dibakar secara tidak terkendali, juga akan menimbulkan uap/gas beracun di udara.

Melihat kondisi yang ada saat ini, maka perlu dilakukan pengawasan oleh dinas/instansi terkait terhadap pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai langkah awal perlu dilakukan inventarisasi/pendataan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan dan juga data pengusaha pengumpul oli bekas setiap tahunnya. Langkah selanjutnya setelah dilakukan pendataan dan pengawasan adalah melakukan penertiban terhadap kegiatan/usaha yang membuang limbah sembarangan atau dengan kata lain tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan bahkan terjadinya kebakaran.



Gambar 11. Limbah B3 Pada Areal Pelabuhan Khusus dan Pertambangan

## BAB III

### UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### A. REHABILITASI LINGKUNGAN

##### A.1. Rencana Dan Realisasi Kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Dan Kegiatan Fisik Lainnya Yang Terkait Dengan Perbaikan Kondisi Lingkungan

Dalam menanggulangi meluasnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai macam kegiatan/usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha maupun masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta berbagai komponen usaha dan masyarakat yang ada telah dan akan terus melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan lajunya kerusakan lingkungan khususnya lahan dan hutan melalui berbagai program, antara lain melakukan upaya merehabilitasi lahan dan hutan yang rusak, melakukan reboisasi pada LOA (*land over area*) atau areal kosong dan terlantar, mengatur perijinan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Kebijakan dalam mengurangi kebakaran lahan dan hutan baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan, pemerintah daerah melakukan pengawasan secara intensif aktivitas pembukaan lahan dengan mengeluarkan aturan mengenai pembakaran lahan dan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi hutan dan lahan, upaya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengendalian kebakaran hutan, melakukan upaya pemadaman kebakaran pada lahan dan hutan yang terbakar. Secara umum program pengelolaan lingkungan yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah daerah pada sektor Kehutanan adalah ::

##### A.1. Program Rehabilitasi Hutan/Lahan

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, antara lain : realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan masih belum sebanding dengan luas lahan kritis yang ada, kegiatan perambahan hutan akibat konversi hutan, *illegal logging* dan *illegal mining* yang secara tidak langsung akan menambah luasan lahan kritis belum dapat diatasi secara nyata serta partisipasi masyarakat yang masih belum mendukung kegiatan rehabilitasi tersebut. Dalam upaya rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan daerah, maka pemerintah melakukan kegiatan penghijauan di wilayah pemukiman dengan pendistribusian bibit tanaman buah-buahan. Realisasi kegiatan rehabilitasi hutan/lahan melalui kegiatan Reboisasi dan Penghijauan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR) dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan sumber dana APBN pada tahun 2007 melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Namun kegiatan ini tidak berlanjut pada tahun berikutnya.

##### A.2. Program Reboisasi dan Penghijauan

Program Reboisasi dan Penghijauan merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan keteduhan serta keindahan kota. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu selaku Instansi teknis melaksanakan

kegiatan tersebut rutin setiap tahunnya. Data rencana dan realisasi kegiatan penghijauan tahun 2008 – 2009 tersaji pada tabel berikut :

Tabel A.2.1. Rencana Dan Realisasi Kegiatan Penghijauan (Hutan Rakyat)

No	Kabupaten	Rencana		Realisasi	
		Luas (Ha)	Jumlah Pohon	Luas (Ha)	Jumlah Pohon
1.	Tanah Bumbu	-	30.000 Batang	-	10.000 Batang
Total		-	30.000 Batang	-	10.000 Batang

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009

Tabel A.2.2. Realisasi Kegiatan Reboisasi

No	Lokasi	Rencana	
		Luas (Ha)	Jumlah Pohon
1	Desa Mangkalapi, Kec. Kusan Hulu	33	36.300 Batang
Total		33	36.300 Batang

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009

Diharapkan dengan kegiatan ini akan menimbulkan dampak positif bagi lingkungan yaitu membantu mengendalikan kenaikan suhu udara daerah perkotaan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan yaitu pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dilakukan melalui kegiatan penghijauan kota dan fasilitas umum, perencanaan pembangunan hutan kota dan pemeliharaan RTH dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya (TA 2007 dan TA 2008).

Program lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan fisik lainnya yang terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan adalah :

A.3. Dari sektor kelautan dan perikanan yaitu :

- Melakukan penanaman kembali hutan mangrove yang rusak dan membentuk Kelompok Peduli Hutan Mangrove dan tidak lagi mengizinkan pembuatan tambak baru serta mengembangkan budidaya keramba
- Pembuatan revertment di sepanjang bibir pantai pada area perairan pelabuhan pemuatan atau pelabuhan khusus untuk mengurangi peningkatan laju abrasi.
- Usaha penanggulangan kerusakan akibat degradasi fisik dan habitat *mangrove* dengan cara merehabilitasi hutan *mangrove* yang rusak melalui penghijauan
- Melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengkajian pengelolaan sumberdaya dan pemulihan ekosistem pesisir, dan laut, sehingga pembangunan dan pemanfaatannya berbasis masyarakat dan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada. Salah satunya pembentukan kelompok

pelestari mangrove di beberapa desa di Kabupaten Tanah Bumbu yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove

#### A.4. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)

Merupakan proses untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat menemukan cara-cara pemecahan permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri khususnya yang terkait dengan penataan dan pengelolaan lingkungan dengan memberdayakan potensi yang ada. Kelompok sasaran masyarakat pesisir yang bermukim sebagai satu komunitas dalam lingkup administrasi satu desa/kelurahan yang terletak diwilayah pesisir dengan taraf ekonomi relatif lemah (miskin), mempunyai kondisi lingkungan pemukiman yang buruk, serta diutamakan berada pada kawasan yang mengalami permasalahan degradasi lingkungan ekosistem pesisir. Lokasi Program PLBPM tahun 2008 di Kabupaten Tanah Bumbu terletak di dua desa yaitu desa Angsana Kecamatan Angsana dan desa Setarap Kecamatan Satui. Wujud bentuk pelaksanaan kegiatan fisik pada Desa Angsana adalah Rehabilitasi dan Pelestarian Ekosistem Pesisir (pembuatan papan himbauan 2 buah dan penanaman pohon ketapang dan cemara 500 batang), rehabilitasi prasarana lingkungan pemukiman (pembangunan dermaga 100 m, pembangunan tong tower air bersih 2 buah dan pembangunan mck 1 unit), dan perbaikan/pembangunan rumah (pembangunan rumah 8 buah dan pembuatan plang rumah 8 buah). Sedangkan di Desa Setarap pelaksanaan kegiatan fisiknya meliputi rehabilitasi dan pelestarian ekosistem pesisir (pembuatan papan himbauan 2 buah dan penanaman pohon mangrove 1000 batang, ketapang dan cemara 500 batang), rehabilitasi prasarana lingkungan pemukiman (pembangunan jalan dermaga 3 buah, pembangunan tempat wudhu 1 unit, renovasi TK Al-qur'an 1 unit, pembangunan tong air bersih 1 unit, pembangunan mck 6 unit, pembangunan jalan cor 300 meter dan pembangunan dermaga 300 meter), perbaikan/pembangunan rumah (pembangunan rumah 7 buah, rehab rumah 34 buah dan pembuatan plang rumah 42 buah).

## B. AMDAL

### B.1. Rekomendasi AMDAL Yang Diberikan Dan Hasil Pengawasan Pelaksanaan UKL/UPL

Selain upaya-upaya berdasarkan sektor seperti tersebut di atas upaya pengendalian lingkungan juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- Sektor lingkungan akan meningkatkan anggaran pembinaan melalui pengawasan, pemantauan dan evaluasi lingkungan.
- Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran kualitas air untuk melakukan pemantauan kualitas air pada DAS dan perusahaan yang didanai oleh APBD maupun APBN dengan sasaran utamanya untuk perbaikan kualitas air di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pengelolaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan maupun perkebunan sehingga diharapkan dapat mengendalikan dampak

negatif seperti pencemaran sumber air dari limbah kegiatan perusahaan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah data perusahaan yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Kegiatan dan atau usaha yang sudah memiliki dokumen tersebut diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

- Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas/Instansi pengelola lingkungan adalah menginventarisasi kegiatan/usaha yang memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL, melakukan pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dari aktifitas masyarakat dengan berbagai sektor kegiatan dan aktifitas pembangunan daerah.
- Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha/kegiatan pemanfaatan SDA harus direncanakan secara baik, simultan, konsisten dan komprehensif serta terbiayai dengan baik pula pada tahun anggaran yang akan datang.
- Efektifitas penanggulangan kegiatan *illegal minning* melalui peran serta Pemerintah Daerah dengan cara melakukan penertiban kegiatan *illegal minning*, sehingga dapat mengurangi bahkan nantinya diupayakan tidak ada lagi kegiatan *illegal minning* di Kabupaten Tanah Bumbu
- Dalam rangka perbaikan lingkungan hidup di daerah bahwa tanggung jawab reklamasi khususnya di lahan eks *illegal minning* dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan sumber dana pelaksanaan reklamasi eks. *illegal minning* diupayakan dari royalti atau melalui kegiatan *Community Development (CD)*

Pada tabel berikut tersaji beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan rekomendasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang ditetapkan oleh komisi AMDAL Daerah sepanjang tahun 2009.

Tabel B.1. Rekomendasi AMDAL/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Berkat Banua Indah
2.	AMDAL	Pembangunan dan Operasional Pabrik Sponge Iron	PT. Meratus Jaya Iron Steel
3.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Autum Beringin Energi
4.	AMDAL	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	PT. Kodeco Agrojaya Mandiri
5.	AMDAL	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	PT. Jaya Mandiri Sukses
6.	AMDAL	Perkebunan Kelapa Sawit	PT. Agro Bukit
7.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	CV. Anugerah
8.	UKL-UPI	Pembangunan dan Operasional Underpass	PT. Baramega Cahaya Makmur
9.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Tapin Sarana Jaya
10.	UKL-UPL	Pembangunan dan Operasional Basecamp	PT. Borneo Indobara
11.	UKL-UPL	Peningkatan Kapasitas Mesin Pembangkit Listrik	PT. PLN
12.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Rizki Utama Mandiri
13.	UKL-UPL	Pelabuhan khusus dan Stockpile Batubara	PT. Lianggang Cemerlang
14.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Natriva Surya Perkasa

15.	UKL-UPL	Pertambangan Bijih Besi	PT. Bakal Makmur Sejahtera
16.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Berkat Bersujud
17.	AMDAL	Pembangunan dan Operasional Tangki dan Terminal CPO	PT. Singaland Asetama
18.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Moffatama Bangunnusa
19.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Mitra Setia Tanah Bumbu
20.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Solaris Tridaya Niaga
21.	UKL-UPL	Pembangunan Jobber	PT. Sabila Soraja Batulicin
22.	AMDAL	Pelabuhan khusus dan Stockpile Batubara	PT. Rizqi Utama Indobara
23.	UKL-UPL	Pertambangan Bahan Galian C	CV. Gunung Besar Rebja Abadi
24.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Usaha Baratama Jesindo
25.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Erlianti Permata Top Indo.
26.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	CV. Iwan Mining
27.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	CV. Mandiri Bara Agung
28.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Bumi Sakti Prakarsa Mandiri
29.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	CV. Sarana Usaha
30.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Sumber Alam Inti Mandiri
31.	UKL-UPL	Pembangunan dan Operasional Underpass	PT. Surya Citra Mahkota Mandiri
32.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	CV. Mitra Anugerah Sejahtera
33.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	CV. Anugerah Borneo Coal
34.	Pengkajian Pemanfaatan LCPKS	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa
35.	UKL-UPL	Pertambangan Batubara	PT. Natriva Surya Perkasa
36.	AMDAL	Pertambangan Batubara	CV. Surya Sumber Daya
37.	AMDAL	Pertambangan Batubara	PT. Praharana Muda Parama

Keterangan : Data diperoleh dari Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan Instansi Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu selaku bidang teknis yang menangani rekomendasi AMDAL/UKL-UPL

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu

Dari tabel tersebut terlihat ada 37 perusahaan pertambangan/perkebunan yang mengajukan rekomendasi AMDAL/UKL-UPL. Sedangkan kondisi riil yang ada di lapangan terlihat masih banyak kegiatan-kegiatan pertambangan maupun kegiatan lain yang masih belum memiliki dokumen dan menyeimbangkan antara kegiatan eksploitasi sumber daya alam dengan pengelolaan lingkungan, sehingga laju kerusakan lingkungan terus meningkat. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan juga memperparah laju kerusakan lingkungan. Karena itu perlu dilakukan kontrol/pengawasan dari berbagai pihak terutama peran Pemerintah Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi teknis di bidang lingkungan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan perusahaan pertambangan/perkebunan/pelus/SPBU, terutama perusahaan-perusahaan yang telah memiliki dokumen. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air, kualitas udara dan limbah B3. Selain itu juga memantau ada tidaknya perijinan lainnya yang harus dilengkapi oleh perusahaan serta masa berlakunya.

Dari beberapa perusahaan yang di pantau hanya sebagian kecil yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan isi dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan bukan semata-mata dari bencana alam maupun perubahan iklim yang ekstrim akhir-akhir ini. Namun sebagian besar lainnya juga disebabkan oleh kegiatan eksploitasi SDA oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah kegiatan/usaha sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan lahan, erosi, sedimentasi maupun pencemaran sumber daya air. Maka Selayaknya pengendalian dampak oleh aktifitas pertambangan skala besar, difokuskan pada peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan seperti AMDAL maupun UKL/UPL, selain itu untuk meningkatkan ketaatan dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL dan UPL secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Berikut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan/perkebunan/pelsus/SPBU di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2009 :

Tabel B.2. Pengawasan UKL-UPL

No.	Waktu (tgl/bln/thn)	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Hasil Pengawasan
			UKL-UPL
1.	08/01/2009	PT. Putra Batulicin Membangun	a. Kualitas air : – Belum ada perlakuan pada settling pond – Belum memiliki izin pembuangan limbah cair b. Kualitas udara : – Belum melakukan uji kualitas udara c. Belum ada pengelolaan limbah B3
2.	13/01/2009	SPBU Kersik Putih	Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL kegiatan SPBU di lokasi tersebut
3.	13/01/2009	SPBU Noor Hidayah Batulicin	Belum melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan
4.	16/01/2009	KUD Nusantara Tambang Batubara	– Settling Pond belum sesuai dokumen – Workshop berpindah-pindah – Limbah B3 dijual ke pengepul
5.	19/01/2009	PT. Bintang Mulia Bara	– Kegiatan penambangan berdekatan dengan lokasi SDN Banjarsari 2 tetapi tidak terjadi longsor – Telah dibuat pagar pengaman di sisi utara SDN Banjarsari 2
6.	28/01/2009	SPBU Sari Gadung	Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL kegiatan SPBU di lokasi tersebut
7.	28/01/2009	SPBU Plajau	Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL kegiatan SPBU di lokasi tersebut
8.	03/02/2009	KUD Tirta Utama	Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL
9.	10/02/2009	PT. Lianggang Cemerlang	– Belum melakukan pengukuran kualitas air secara periodic – Belum ada SK UKL-UPL Bupati Tanah Bumbu untuk kegiatan pertambangan di lokasi tersebut

			- Hanya memiliki ijin untuk kegiatan pelsus
10.	18/02/2009	PT. Terminalindo Idaman Permai	- Belum memiliki ijin HO - Settling pond belum sesuai dengan standard
11.	24/03/2009	PT. Eka Persada Utama	Belum memiliki ijin pembuangan limbah cair
12.	25/04/2009	CV. Bina Usaha	Belum memiliki ijin pembuangan limbah cair
13.	28/04/2009	CV. Siti Maju Sejahtera	Belum ada akses jalan menuju settling pond
14.	30/04/2009	PT. Putra Batulicin Membangun	Keadaan settling pond belum sesuai dengan standard
15.	27/05/2009	PT. Purnama Surya Cipta	- Settlingpond di luar wilayah konsesi - Belum ada izin pembuangan limbah cair
16.	03/06/2009	PT. Lianggang Cemerlang (Washing Plant)	- Belum ada laporan triwulan - Belum ada izin pembuangan limbah cair
17.	11/06/2009	PT. Eka Satya Pratama	Belum memiliki izin pembuangan air limbah (titik penataan)
18.	17/06/2009	PT. Rizki Utama Indobara (Pelsus)	- Belum ada workshop - Belum memiliki AMDAL dan izin pembuangan limbah cair
19.	23/07/2009	SPBU Pagatan	- Izin HO yang dimiliki sudah habis masa berlakunya - Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL
20.	23/07/2009	SPBU Sei. Kecil	Belum dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL
21.	24/07/2009	PT. Buana Karya Wiranata	- Belum melakukan uji kualitas air
22.	19/08/2009	PT. Bara Mega Berkah Utama	- Belum menyampaikan laporan triwulan - Tutupan OB akan dilakukan pembongkaran kembali
23.	26/08/2009	PT. Autum Beringin Energi	- Belum menyampaikan laporan triwulan
24.	26/08/2009	PT. Natriva Surya Perkasa	- Belum memiliki settling pond - Kegiatan tambang berhenti sementara
25.	08/09/2009	KUD. Hatiif Bara Makmur	- Belum menyampaikan laporan triwulan - Kegiatan tambang berhenti sementara

Keterangan : Data diperoleh dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Instansi Bapedalda Kab. Tanah Bumbu selaku bidang teknis yang menangani masalah kegiatan pengelolaan lingkungan oleh masyarakat

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu

## C. PENEKAKAN HUKUM

### C.1. Pengaduan Masyarakat Dan Tindak Lanjutnya

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mutu kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pembangunan itu sendiri disatu pihak menghadapi masalah karena jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan persebarannya tidak merata, di lain pihak ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang akan berakibat pada tekanan terhadap sumber daya alam itu sendiri. Berbagai bentuk aktifitas pembangunan yang dapat menjadi sumber tekanan bagi kelestarian lingkungan ini adalah seperti aktifitas pertanian dalam skala menengah dan besar, kehutanan, industri CPO, pertambangan batubara, pertambangan bijih besi, maupun proyek-proyek pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berbagai dampak buruk penurunan kualitas lingkungan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, seperti terjadinya tingkat erosi permukaan yang lebih tinggi yang berakibat tanah kehilangan sifat plastisnya, penurunan porositas dan irifiltrasi tanah, berkurangnya daya tangkap tanah terhadap air, terjadinya perubahan pH tanah secara drastis, keseimbangan unsur hara terganggu. Semua ini akan terasa setelah beberapa tahun kemudian dan akan lebih mengalami kerusakan secara global. Akibat lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah adanya banjir baik daerah rawan banjir maupun yang belum tersentuh banjir. Bencana asap akibat pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia baik industri, bisnis maupun bidang lainnya, hal ini merupakan akibat dan ulah manusia itu sendiri.

Berikut adalah salah satu masalah lingkungan akibat dari adanya kegiatan perkebunan di sekitar pemukiman penduduk yang limbah/hasil samping dari mesin produksi diindikasikan dibuang ke perairan umum tanpa dikelola terlebih dahulu pada kolam penampungan limbah sehingga dikhawatirkan akan mencemari sumber air di sekitar lokasi kegiatan, dimana sumber air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk aktifitas dan konsumsi sehari-hari.

Tabel C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah dan Status Pengaduannya

No.	Masalah Yang Diadukan	Jumlah Pengaduan	Status
1.	Pencemaran air sungai dan pembuangan limbah oleh PT. Gawi Makmur Kalimantan	1	Dalam proses penyelesaian

Keterangan : Data diperoleh dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Instansi Bapedalda Kab. Tanah Bumbu selaku bidang teknis yang menangani masalah pengaduan lingkungan oleh masyarakat

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu

Masalah lingkungan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu melalui bidang teknis yang menangani masalah pengaduan lingkungan. Dari hasil pengawasan didapatkan bahwa limbah yang diindikasikan dibuang ke perairan umum tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu bukan merupakan limbah produksi tetapi berasal dari hasil samping mesin produksi. Namun sudah dilakukan teguran dan pembinaan terhadap perusahaan tersebut agar melakukan pengelolaan limbah sesuai SOP, baik itu limbah dari hasil produksi maupun limbah/hasil samping dari mesin pengolah, agar nantinya tidak terjadi pencemaran jika dibuang ke perairan umum.

Oleh karena itu seperti telah diuraikan di atas, bahwa betapa pentingnya peranan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan keterlibatan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan/perkebunan/pelsus/SPBU untuk melakukan kegiatan/usaha mereka sesuai dengan Prosedur Operasi Standar sehingga kegiatan tersebut tidak terlalu menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang besar karena diimbangi dengan adanya pengelolaan lingkungan dan perbaikan lingkungan yang baik.

#### **D. PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **D.1. Upaya Perbaikan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat**

Kegiatan pelestarian lingkungan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Mengingat masyarakat sebagai pelaku kegiatan yang sekaligus juga sebagai pihak yang menerima dampak positif maupun negatif dari kegiatan itu sendiri. Pemberdayaan peran serta masyarakat dimaksudkan untuk menunjang program-program perbaikan lingkungan. Keterlibatan peran serta dari masyarakat dapat dilaksanakan di berbagai sektor. Dari sektor kelautan dan perikanan, salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat adalah Program pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM) yaitu suatu proses untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat menemukan cara-cara pemecahan permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri khususnya yang terkait dengan penataan dan pengelolaan lingkungan dengan memberdayakan potensi yang ada. Pada saat nantinya terjadi keberlanjutan program ini oleh masyarakat, pemerintah daerah bersama stakeholders terkait lainnya dengan mengambil peran pengembangan keberlanjutan tersebut kedalam proses pembangunan daerahnya. Kelompok sasaran (target group) adalah masyarakat pesisir yang bermukim sebagai satu komunitas dalam lingkup administrasi satu desa/kelurahan yang terletak diwilayah pesisir dengan taraf ekonomi relatif lemah (miskin), mempunyai kondisi lingkungan pemukiman yang buruk, serta diutamakan berada pada kawasan yang mengalami permasalahan degradasi lingkungan ekosistem pesisir. Lokasi Program PLBPM tahun 2008 di Kabupaten Tanah Bumbu terletak di dua desa yaitu desa Angsana Kecamatan Angsana dan

desa Setarap Kecamatan Satui. Dana dari program ini berasal dari APBN yang pengelolannya dilakukan oleh Dinas terkait beserta masyarakat.

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove membentuk kelompok pelestari mangrove di beberapa desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan utamanya melakukan pengelolaan dan pengkajian pengelolaan sumberdaya dan pemulihan ekosistem pesisir/laut dimana pembangunan/pemanfaatannya berbasis masyarakat dan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada.

Dari sektor lingkungan hidup, salah satu kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat adalah kegiatan Adiwiyata. Kegiatan adiwiyata yang dilaksanakan pada tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah terhadap peningkatan kelestarian lingkungan melalui perbaikan kualitas fisik lingkungan sekolah, misalnya dengan perbaikan fasilitas kebersihan (tempat sampah), WC/toilet sekolah, kelestarian taman (tanaman/pohon pelindung, tanaman obat-obatan dll), kebersihan lingkungan sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kebersihan sekolah dsb. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi oleh Bapedalda Kab. Tanah Bumbu ke beberapa sekolah (SD, SMP dan SMA sederajat) di 10 Kecamatan Kab. Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan penilaian ke sekolah-sekolah yang masuk dalam nominasi Adiwiyata. Dari tingkat Kabupaten, penilaian akan diteruskan ke tingkat Provinsi dan ke tingkat Nasional. Berikut secara lengkap diuraikan kegiatan fisik kualitas perbaikan lingkungan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat :

Tabel D.1. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Rehabilitasi hutan mangrove (112.500 Batang)	Desa Betung, Kersik Putih, Segumbang, Tungkaran Pangeran dan Batulicin	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Tanah Bumbu PT. Arutmin Indonesia Swadaya Masyarakat
2.	Kelompok Pemerhati / Pelestari Mangrove (23.313 Ha)	Kec. Satui, Angsana, Batulicin, Simpang Empat, Kusan Hilir dan Sei. Loban (32 Desa Pesisir)	Masyarakat pesisir di beberapa desa di Kab. Tanah Bumbu bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu
3.	Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	± 60 Desa di Kab. Tanbu	Masyarakat pesisir di beberapa desa di Kab. Tanah Bumbu bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu
4.	Pembentukan kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS) (23.315 Ha)	Kec. Angsana dan Kec. Sei. Loban	Masyarakat pesisir di beberapa desa di Kab. Tanah Bumbu bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu
5.	Program pengelolaan lingkungan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM)	Desa Setarap dan Desa Angsana	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah bumbu dengan melibatkan masyarakat sekitar pesisir

6.	PDSB melalui kegiatan pra koperasi	Kabupaten Tanah Bumbu	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu dan masyarakat di 10 Kecamatan
7.	Adiwiyata	Sekolah SD, SMP, SMA sederajat di Kabupaten Tanah Bumbu	Warga sekolah (pelaksanaan kegiatan berdasarkan sosialisasi kegiatan Adiwiyata yang dilaksanakan oleh Bapedalda Kab. Tanah Bumbu)
8.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	3 Kecamatan (Kusan Hilir, Simpang Empat, Batulicin)	Bapedalda Kab. Tanah Bumbu bekerjasama dengan 13 instansi terkait (instansi dominant adalah Disdikpora, Diskes, Distabpshan) dan Kantor Kecamatan sebagai mediator untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan fisik kualitas Adipura

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 12. Kondisi Hasil Rehabilitasi Mangrove Oleh Kelompok Pelestari Mangrove



Gambar 13. Kegiatan Penanaman Mangrove Oleh Kelompok Pelestari Mangrove

## E. KELEMBAGAAN

### E.1. Produk Hukum Yang Dihasilkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Daerah memberikan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti adanya kegiatan pertambangan, perkebunan, pelsus, pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Pesatnya laju pembangunan yang bertujuan untuk perbaikan ekonomi masyarakat akhirnya akan membawa berbagai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang didapat adalah peningkatan PAD dari banyaknya kegiatan pengelolaan SDA oleh para investor serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi usaha. Namun seiring dengan makin banyaknya kegiatan eksploitasi SDA, tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggungjawab, yang ditandai dengan banyaknya kerusakan lingkungan pada lokasi-lokasi kegiatan eksploitasi SDA. Maka Pemerintah Daerah selaku pemberi kebijakan dalam pengelolaan SDA juga wajib mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan dalam bentuk produk hukum pengelolaan lingkungan. Produk hukum tersebut dimaksudkan untuk menekan laju kerusakan lingkungan. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan kegiatan/usahanya sesuai dengan SOP/prosedur dan mentaati segala kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya laju kerusakan lingkungan dapat ditekan dan tidak semakin meluas tiap tahunnya. Berikut beberapa produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Tabel E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan

No.	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1	Peraturan Gubernur	5	2007	Peruntukan dan baku mutu air sungai
2	Peraturan Gubernur	053	2007	Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan
3	Peraturan Gubernur	036	2008	Baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, hotel, restoran, rumah sakit, domestik dan pertambangan
4	Peraturan Daerah Kabupaten	2	2005	Retribusi izin gangguan (HO)
5	Peraturan Daerah Kabupaten	11	2005	Kewenangan kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom
6	Peraturan Daerah Kabupaten	19	2005	Pembinaan dan retribusi perizinan pemanfaatan limbah cair
7	Peraturan Daerah Kabupaten	20	2005	Pembinaan dan retribusi perusahaan/pengelolaan sarang burung walet
8	Peraturan Daerah Kabupaten	29	2005	Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
9	Peraturan Daerah Kabupaten	9	2006	Izin Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Khusus

10	Peraturan Daerah Kabupaten	12	2006	Pembinaan dan Retribusi Perizinan Usaha Peternakan
11	Peraturan Daerah Kabupaten	17	2007	Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
12	Peraturan Daerah Kabupaten	06	2008	Retribusi jasa perizinan bidang lingkungan hidup
13	SK. Bupati	48	2003	Prosedur/persyaratan jenis usaha izin gangguan (HO)
14	SK. Bupati	105	2003	Pembentukan tim koordinasi inventarisasi dan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang Kabupaten Tanah Bumbu
15	SK. Bupati	293	2004	Pembentukan tim monitoring galian "c" di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
16	SK. Bupati	294	2004	Pembentukan tim monitoring rencana pemindahan sungai Jelamu di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
17	SK. Bupati	128	2005	Pembentukan tim penilai program bangun praja Kabupaten Tanah Bumbu
18	SK. Bupati	197	2005	Pembentukan tim terpadu penertiban penambang dan penertiban lingkungan hidup pada dampak pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
19	SK. Bupati	256	2005	Penetapan swakelola pelaksanaan kegiatan penghijauan kota dan fasilitas umum sumber dana APBD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2005
20	SK. Bupati	244	2006	Sumbangan pihak ketiga (SP-III) terhadap pelaksanaan penelitian dokumen rencana pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
21	SK. Bupati	94	2007	Pembentukan Tim Penyusunan Laporan dan Pengumpulan Data Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007
22	SK. Bupati	62	2008	Pembentukan tim pelayanan pengaduan kasus lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu
23	SK. Bupati	69	2008	Pembentukan komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) Kabupaten Tanah Bumbu
24	SK. Bupati	148	2008	Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan pengendalian serta tim pemantauan dan pemulihan pengelolaan dampak lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu
25	SK. Bupati	226	2008	Pembentukan panitia hari lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu

Keterangan : Perda/SK Gubernur/SK Bupati/SK Walikota

Sumber : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Tanah Bumbu

Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan lingkungan, maka Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu selaku Instansi teknis yang menangani bidang pengelolaan lingkungan hidup memerlukan dana/anggaran setiap tahunnya. Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 3 (tiga) bidang teknis yaitu APDL (analisis pengendalian dampak lingkungan), WASDAL (pengawasan dampak lingkungan) dan TAULIH (pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan). Masing-masing bidang tersebut mempunyai tupoksi yang berbeda, namun satu

tujuan yaitu untuk mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari berbagai macam kegiatan/usaha. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan pada tahun 2009 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan

No.	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran	
		Tahun 2008	Tahun 2009
1.	APBD	Rp. 969,786,100,-	1.253.000.000,-
2.	APBN	Rp. 790,000,000 -	950.00.000,-
3.	Bantuan Luar Negeri	-	
<b>Total</b>		<b>Rp. 1,759,786,100,-</b>	<b>2.203.000.000,-</b>

Keterangan : Anggaran yang dikelola oleh Bapedalda atau Instansi Pengelola Lingk. Sumber : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Tanah Bumbu

Untuk kelancaran pelaksanaan program-program Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan pelaksana kegiatan/SDM yang kompeten di bidangnya. Namun mengingat keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknis, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui kegiatan pelatihan, workshop maupun seminar lingkungan. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut semakin meningkatkan kompetensi SDM pelaksana kegiatan. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana Bapedalda, juga diupayakan peningkatan kesadaran dan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik yaitu masyarakat pada umumnya diantaranya warga sekolah dan para pelaku usaha baik skala kecil, menengah maupun skala besar serta dinas/instansi teknis. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, misalnya penyelenggaraan Sosialisasi Adiwiyata dengan sasaran utama warga sekolah di seluruh Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, dan Sosialisasi Perundang-undangan Lingkungan Hidup dengan sasaran berbagai macam dinas/instansi teknis, para pelaku usaha yang meliputi kegiatan pertambangan, perkebunan dan pelsus. Uraian jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan secara lengkap tersaji pada tabel berikut :

Tabel E.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Peserta	Waktu Penyuluhan (Tgl/Bln/Thn)
1.	Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan pertambangan, pelabuhan dan perkebunan kelapa sawit	Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu	Instansi terkait (Dishub, Dishut, Dis PU, Distannak, Distamben, dll), Perusahaan pertambangan, pemilik kegiatan pelabuhan khusus dan perusahaan perkebunan kelapa sawit	Maret 2009
2.	Diklat PPNS Pola 150 JP	Pusdiklat LH Serpong	Tinus, SP	13 April – 7 Mei 2009
3.	Kursus AMDAL Penyusun	PPLH Banjarmasin	Hargus Prihatin, S.Hut	10 Juni – 21 Juli 2009

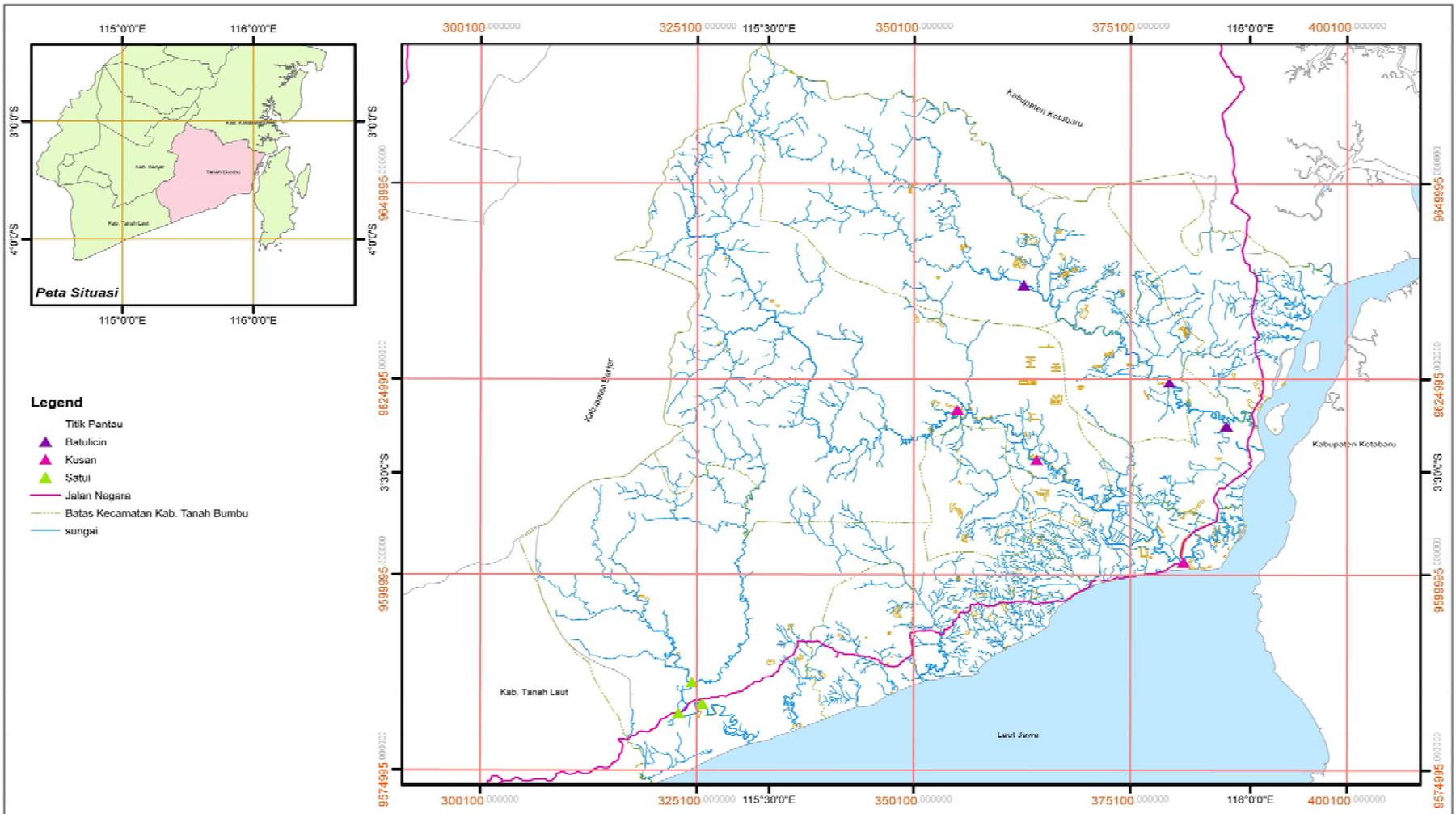
4.	Workshop persiapan penerapan lisensi komisi penilai AMDAL	BLHD Provinsi Kalsel	Tinus, SP	17 Juni – 19 Juni 2009
5.	Diklat pengawas LH	Pusdiklat LH Serpong	H. Marbani, S.Pd, M.AP	22 Juni – 27 Juni 2009
6.	Sosialisasi Adiwiyata	Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu	SD, SMP, SMA sederajat se-kec. : - Sungai Loban - Kusan Hulu - Simpang Empat - Satui - Karang Bintang - Angsana - Kuranji - Batulicin - Mantewe - Kusan Hilir	22 Juni 2009 23 Juni 2009 24 Juni 2009 25 Juni 2009 01 Juli 2009 22 Juli 2009 23 Juli 2009 27 Juli 2009 29 Juli 2009 30 Juli 2009
6.	Diklat Evaluasi SDA dan LH	Pusdiklat LH Serpong	Indra Warna, S.Hut	2 Agustus 2009
7.	Sosialisasi Perundangan-undangan LH	Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu	Instansi terkait (Dishub, Dishut, Dis PU, Distannak, Distamben, dll), Perusahaan pertambangan, pemilik kegiatan pelabuhan khusus dan perusahaan perkebunan kelapa sawit	20 Agustus – 21 Agustus 2009

Sumber : Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu

Dari keseluruhan upaya pengelolaan lingkungan yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu rehabilitasi lingkungan, AMDAL, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan, menunjukkan bahwa ada upaya nyata dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakannya untuk menyeimbangkan antara pengelolaan SDA dan kegiatan pengelolaan lingkungan bersama-sama dengan masyarakat dan para pelaku usaha. Dan diharapkan dari keseluruhan upaya tersebut adalah menuju perbaikan kualitas lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga beberapa tahun mendatang tercipta lingkungan sehat dan hijau.

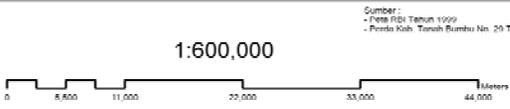
## DAFTAR PUSTAKA

1. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu
2. Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu
3. Data Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasil Kabupaten Tanah Bumbu
4. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu
5. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu
6. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu
7. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
8. Data Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu
9. Data Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu
10. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
11. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12. Data Seksi III Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Tanah Bumbu
13. Data dari Subid. Pada Baepdalda Kabupaten Tanah Bumbu
14. Data Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Kotabaru
15. Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan
16. Data pada Buku Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2007/2008 dan Tahun 2008/2009
17. Laporan Triwulan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Site Batulicin Tahun 2008 dan 2009

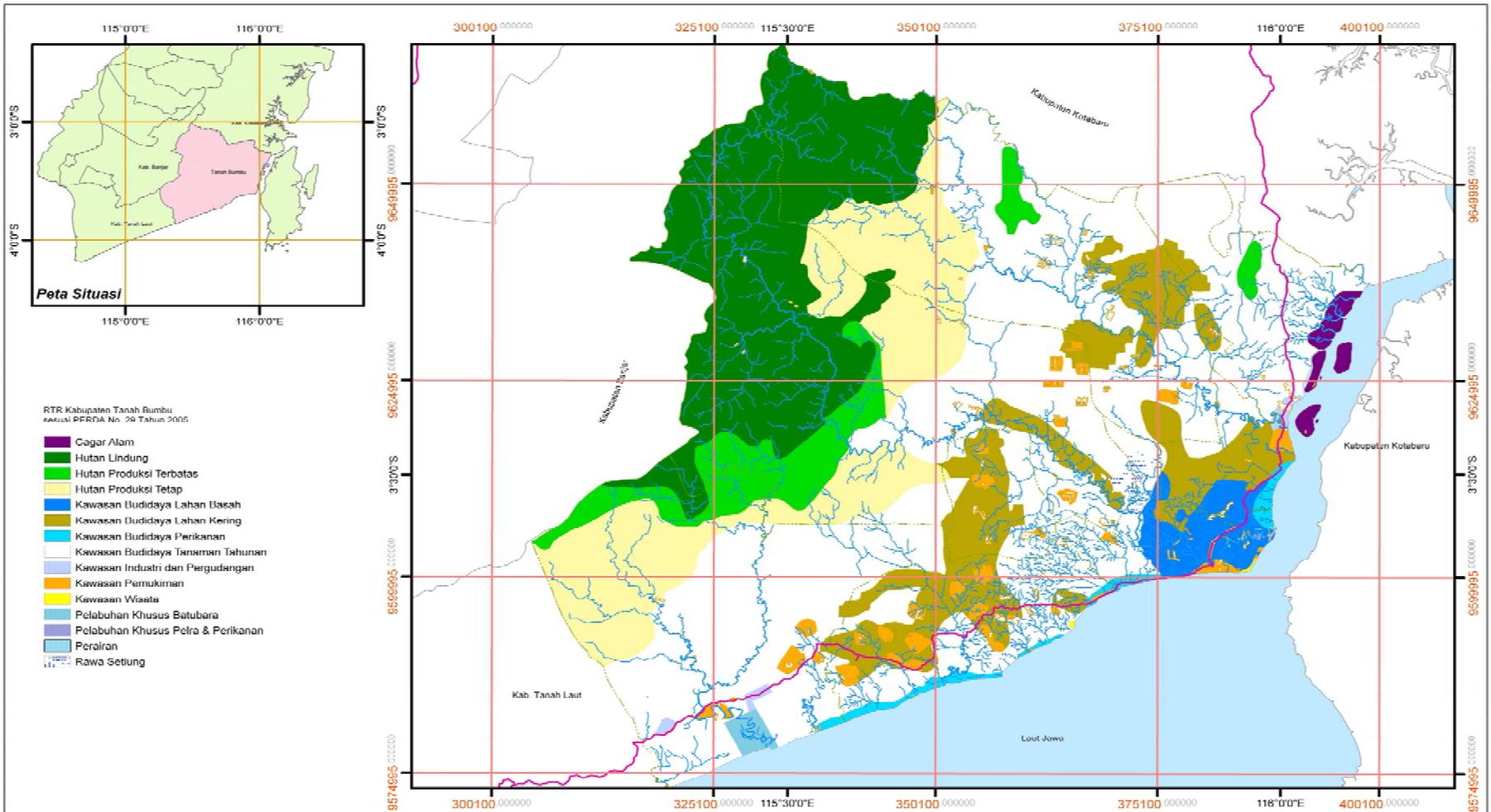


- Legend**
- ▲ Titik Pantau
  - ▲ Batulicin
  - ▲ Kusan
  - ▲ Satui
  - Jalan Negara
  - - - Batas Kecamatan Kab. Tanah Bumbu
  - sungai

**PETA LOKASI  
PEMANTAUAN KUALITAS AIR  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



 Sheet No. Tala Ruang 1	<b>SLHD Kabupaten Tanah Bumbu</b>	
	Drawn By:	Ropedolda Kabupaten Tanah Bumbu
	Checked by:	Ropedolda kabupaten Tanah Bumbu
Date:	Nopember 2008	



RTR Kabupaten Tanah Bumbu  
sesuai PERDA No. 29 Tahun 2005

- Cagar Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Budidaya Lahan Basah
- Kawasan Budidaya Lahan Kering
- Kawasan Budidaya Perikanan
- Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan
- Kawasan Industri dan Pergudangan
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Wisata
- Pelabuhan Khusus Batubara
- Pelabuhan Khusus Petra & Perikanan
- Perairan
- Rawa Setling

**PETA  
RENCANA TATA RUJANG WILAYAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

1:600,000



Sumber:  
- Peta RBI Tahun 1999  
- Perda Kab. Tanah Bumbu No. 29 Tahun 2005



Sheet No.  
Tata Ruang 1

**SLHD Kabupaten Tanah Bumbu**

Drawn by: Bappedala Kabupaten Tanah Bumbu  
Checked by: Bappedala Kabupaten Tanah Bumbu  
Date: Nopember 2005